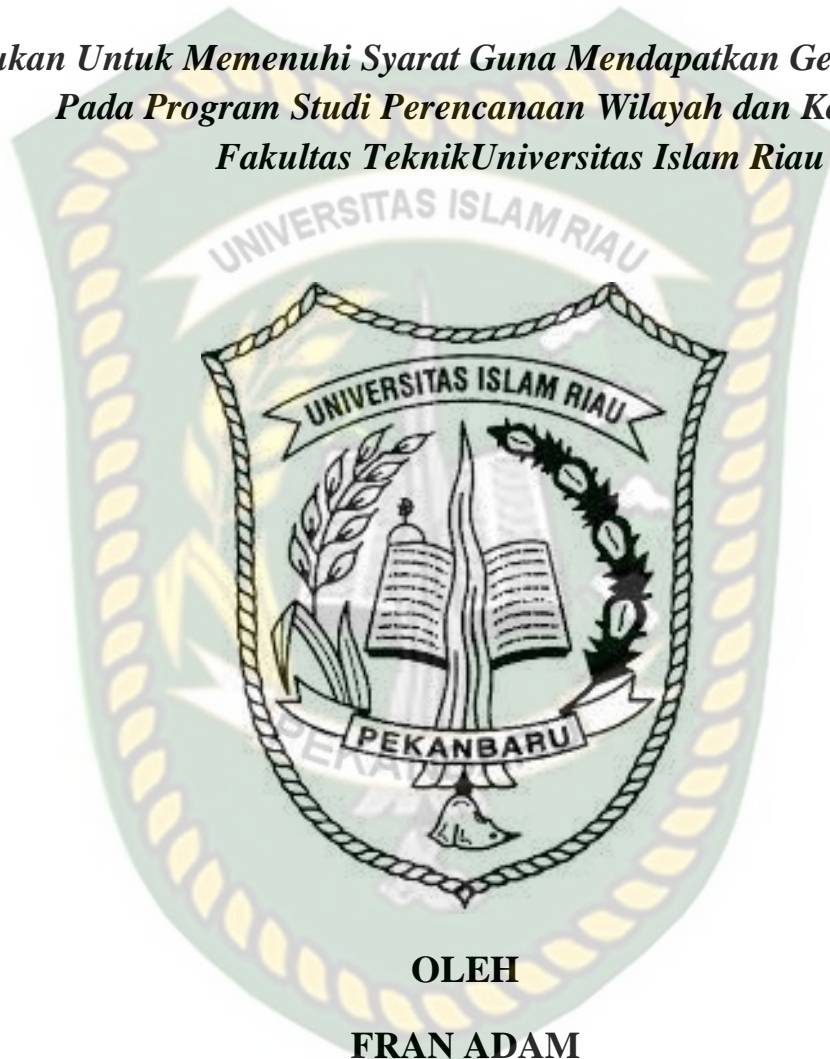


**PENGARUH TRANSMIGRASI TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU,
KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN ROKAN HILIR**

Tugas Akhir

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH

FRAN ADAM

143410745

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

TA 2020/2021

**PENGARUH TRANSMIGRASI TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU, KECAMATAN
BANGKO, KABUPATEN ROKAN HILIR**

FRAN ADAM

143410745

ABSTRAK

Transmigrasi adalah salah satu program kependudukan di Indonesia yang sudah berlangsung cukup lama. Dimulai dari jaman pemerintahan kolonial Belanda Tahun 1905 (dikenal dengan istilah kolonisasi) dengan tujuan utama selain untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru merupakan bagian dari Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang mengalami proses transmigrasi, pada Tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah teridentifikasi pengaruh transmigrasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruhnya, perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis pengolahan data yang digunakan adalah analisis metode analisis statistika deskriptif melalui tabel rerata (*cross tabulation*) menggunakan software SPSS 13.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Terdapat perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pelaku transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, dalam hal ini pekerjaan dan tingkat pendapatan jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi di daerah asalnya. Peran transmigrasi bagi perkembangan wilayah telah menuai berbagai perubahan seperti perubahan pada sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa program transmigrasi berpengaruh yang baik terhadap masyarakat transmigran.

Kata Kunci : Transmigrasi, Pengaruh Tranmigrasi, Sosial Ekonomi Masyarakat.

**TRANSMIGRATION EFFECT OF DEVELOPMENT AREA AT
KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU, KECAMATAN BANGKO,
KABUPATEN ROKAN HILIR**

FRAN ADAM

143410745

ABSTRACT

Transmigration is one of the population programs in Indonesia that has been going on for quite a long time. Starting from the era of the Dutch colonial government in 1905 (known as colonization) with the main objective not only to reduce population density on the island of Java, but also to meet the needs of labor in areas outside Java. Labuhan Tangga Baru Village is part of Bangko District, Rokan Hilir Regency, Riau Province, which experienced a transmigration process, in 1998. The purpose of this study was to identify the effect of transmigration on community welfare and its impact on the development of the Labuhan Tangga Baru Village area.

This study uses a qualitative descriptive method, with techniques primary and secondary data collection. The data processing analysis used was descriptive statistical analysis method analysis through the mean table (cross tabulation) using SPSS 13 software.

Based on the results of previous research, there have been changes in the socio-economic conditions of the transmigrant community in Labuhan Tangga Baru, in this case the employment and income levels are much better, when compared to the socio-economic conditions in their home regions. The role of transmigration for regional development has reaped various changes such as changes in educational facilities, health care and worship. It can be said that the transmigration program had a good effect on the transmigrant community.

Keywords: Transmigration, Influence of Transmigration, Social Economy of Society.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhaanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan namun dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda **Kurnia Jaya, Ms** dan ibunda **Yani Suhari** atas jasa, pengorbanan, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas;
2. Abang serta Kakak saya tercinta **Febri Lusiana, Putra Irawan, Feri Handiki** atas doa, dukungan, perhatian serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi ini;
3. Rektor Universitas Islam Riau **Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL** beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak **Ir. H. Abdul Kudus Z, MT** yang telah memberikan arahan kepada kami selama perkuliahan sampai penyelesaian pendidikan ini;
5. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen, dan Staf Administrasi Fakultas Teknik yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan;

6. Ibu **Puji Astuti, ST., MT** selaku ketua jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
7. Ibu **Puji Astuti, ST, MT** selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi hingga selesai;
8. Bapak **Ir. Firdaus Agus, Mp** dan Ibuk **Rona Muliana, ST, MT** selaku penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai;
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Islam Riau.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu atas dukungan dan doa demi kelancaran penyelesaian pendidikan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhaanahu wa ta'ala, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Januari 2020

Penulis,
Fran Adam
143410745

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Materi.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	9
1.5.3 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Transmigrasi.....	18
2.1.1 Syarat Transmigrasi.....	19
2.1.2 Tujuan Transmigrasi.....	20
2.1.3 Jenis – Jenis Transmigrasi.....	23
2.1.4 Pengaruh Transmigrasi.....	26
2.1.5 Teori dan Konsep Tentang Transmigrasi.....	28
2.2 Sosial Ekonomi.....	30
2.3 Faktor Pendukung Sosial Ekonomi.....	31
2.3.1 Tingkat Taraf Hidup.....	33
2.3.2 Pendapatan.....	33
2.3.3 Budaya Lokal Dengan Budaya Transmigrasi.....	35

2.3.4	Asimilasi.....	36
2.3.5	masyarakat.....	37
2.3.6	Tingkat Kesejahteraan	38
2.3.7	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi	39
2.3.8	Kesehatan	40
2.3.9	Keamanan.....	41
2.3.10	Kemandirian	41
2.3.11	Kepemilikan Aset	42
2.4	Pengembangan Wilayah	43
2.4.1	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah	44
2.4.2	Stadia – Stadia Pembangunan	45
2.4.3	Pemanfaatan Lahan Kosong	47
2.4.4	Produksi Dibidang Pertanian.....	48
2.4.5	Pemerataan Penduduk	49
2.4.6	Tingkat Pengangguran.....	52
2.5	Teori Pengembangan Wilayah.....	54
2.6	Sejarah Transmigrasi di Indonesia	59
2.6.1	Priode Kolonisasi	59
2.6.2	Priode Pelita (1969 – 1999)	60
2.6.3	Priode Reformasi.....	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian	76
3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	76
3.2.1	Lokasi Penelitian	76
3.2.2	Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	77
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	77
3.3.1	Sumber Data	77
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	78

3.4	Populasi dan Teknik Sampling	79
3.4.1	Populasi	79
3.4.2	Sampel	80
3.4.3	Teknik Sampling	80
3.5	Metode Analisis Data	83
3.5.1	Analisis Deskriptif Kualitatif	83
3.6	Variabel Penelitian	83
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	85
4.2	Letak Geografis dan Batas Wilayah	87
4.3	Kependudukan Kecamatan Bangko	89
4.4	Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	90
4.5	Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	93
4.5.1	Pembagian Wilayah Kepenghuluan	93
4.5.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan	93
4.6	Susunan Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko	94
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Karakteristik Masyarakat	95
5.1.1	Kelompok Umur	95
5.1.2	Pekerjaan Masyarakat	96
5.1.3	Asal Masyarakat	97
5.2	Analisis Perkembangan Ekonomi Masyarakat	98
5.3	Analisis Penghasilan Masyarakat	98
5.3.1	Analisis Kepemilikan Tabungan	104
5.4	Analisis Kearifan Lokal	105
5.4.1	Kearifan Budaya Lokal	105
5.4.2	Budaya Lokal Oleh Transmigrasi	106

5.5	Analisis Asimilasi	107
5.5.1	Peran Serta Penduduk Lokal dan Transmigrasi.....	107
5.5.2	Gotong Royong	108
5.6	Analisis Tingkat Kesejahteraan	109
5.6.1	Tingkat Pendidikan.....	109
5.6.2	Keluarga Yang Sudah Bekerja	110
5.6.3	Kepemilikan Aset Tanah	111
5.6.4	Status Kepemilikan Aset Tanah	112
5.6.5	Kepemilikan Moda Transportasi	113
5.6.6	Kepemilikan Hewan Ternak.....	114
5.6.7	Analisis Sarana Keamanan di Desa.....	115
5.6.8	Tingkat Kesejahteraan di Desa	116
5.6.9	Tingkat Keamanan di Desa	117
5.6.10	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga	118
5.6.11	Bantuan Bahan Pangan Dari Pemerintah	119
5.7	Analisis Penggunaan Lahan	120
5.7.1	Penggunaan Lahan Sebelum Transmigrasi	120
5.7.2	Penggunaan Lahan Setelah Transmigrasi.....	121
5.8	Analisis Bidang Pertanian	122
5.9	Analisis Pemerataan Penduduk	124
5.9.1	Tingkat Kepadatan Penduduk.....	124
5.9.2	Pemerataan Penduduk Lokal dan Transmigrasi	126
5.10	Analisis Tingkat Pengangguran	127
5.10.1	Tingkat Pengangguran di desa.....	127
5.10.2	Tingkat Pengangguran Setelah Transmigrasi.....	128
5.11	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	130
5.12	Peran Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	134
5.13	Hasil Rekapitulasi Penelitian	135

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan..... 139

6.2 Saran..... 140

DAFTAR PUSTAKA 141



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penempatan Transmigrasi Dari Era Kolonisasi	67
Tabel 2.2	Studi Terdahulu.....	71
Table 3.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Tahun 2017	81
Table 3.2	Variabel Penelitian.....	84
Tabel 4.1	Peristiwa Baik Buruk Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	86
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Bangko Menurut Kepenghuluan Labuhan Tangga baru.....	87
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Pada Tahun 2017.....	89
Tabel 4.4	Daftar penempatan UPT III Rokan N8 Kecamatan Bangko.....	91
Table 4.5	Daftar Kelompok Tani UPT III Rokan	92
Table 5.1	Rentang Usia Masyarakat.....	95
Table 5.2	Pekerjaan Masyarakat	96
Table 5.3	Asal Responden.....	98
Table 5.4	Pendapatan Masyarakat Lokal dan Transmigrasi.....	99
Table 5.5	Kepemilikan Tabungan Masyarakat.....	104
Table 5.6	Keberadaan Budaya Lokal	105
Table 5.7	Budaya Lokal dan Transmigrasi	106
Table 5.8	Peran Masyarakat Terhadap Asimilasi.....	107
Table 5.9	Gotong Royong Dalam Pembangunan Desa.....	108
Table 5.10	Pendidikan Terakhir Responden	109
Table 5.11	Keluarga Yang Sudah Bekerja	110
Table 5.12	Kepemilikan Aset Tanah Masyarakat	112
Table 5.13	Status Kepemilikan Aset Tanah	113
Table 5.14	Kepemilikan Moda Transportasi.....	114
Table 5.15	Kepemilikan Hewan Ternak.....	115
Table 5.16	Sarana Keamanan di Desa.....	116
Table 5.17	Tingkat Kejahatan di Desa	116
Table 5.18	Tingkat Keamanan di Desa	117
Table 5.19	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga.....	118
Table 5.20	Bantuan Bahan Pangan Dari Pemerintah	119

Table 5.21 Penggunaan Lahan Sebelum Adanya Transigrasi	121
Table 5.22 Penggunaan Lahan Setelah Adanya Transmigrasi	122
Table 5.23 Produksi di Bidang Pertanian.....	123
Table 5.24 Tingkat Kepadatan Penduduk	125
Table 5.25 Pemerataan Penduduk Lokal dan Transmigrasi.....	127
Table 5.26 Jumlah Pengangguran.....	128
Table 5.27 Tingkat Pengguran	129
Table 5.28 Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.....	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	10
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kecamatan Bangko.....	11
Gambar 1.3	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir	12
Gambar 1.4	Kerangka Berfikir.....	14
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transmigrasi adalah salah satu program kependudukan di Indonesia yang sudah berlangsung cukup lama. Dimulai dari jaman pemerintahan kolonial Belanda Tahun 1905 (dikenal dengan sebutan kolonisasi) dengan tujuan utama untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa. Setelah kemerdekaan, pada awal orde lama, selain tujuan demografis, sesuai dengan Undang-undang No. 20/1960, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Orde Baru, sasaran utama transmigrasi semakin berkembang ke arah tujuan-tujuan non-demografis lainnya. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 menyatakan tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata keseluruhan Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Pergeseran peninjauan untuk menentukan sikap pembangunan Wilayah menyebabkan permukiman transmigrasi didesain untuk ditumbuh kembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Pada era otonomi daerah, transmigrasi masih menjadi salah satu model pembangunan. Namun penyelenggaraan transmigrasi dihadapkan pada tantangan terkait dengan perubahan tata pemerintahan. Penerapan otonomi daerah selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada perancangan transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi

sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah. Perubahan-perubahan tersebut telah melahirkan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan transmigrasi adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di samping pembangunan daerah, berbagai kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang berperan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, bahkan pemerintahan. Najiyati (2006) dari penelitiannya terhadap 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi menemukan bahwa sebanyak 520 unit atau 37% mampu menjadi sentra produksi pangan sedangkan yang lainnya berkembang menjadi titik pusat produksi komoditas lain terutama tanaman perkebunan. Program transmigrasi telah ikut menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan perdesaan baru. Dari sekitar 3000 UPT dengan berbagai infrastruktur, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru (Pusdatintrans dan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi, 2009). Desa-desa baru eks lokasi transmigrasi tersebut telah berkembang dan tumbuh menjadi kecamatan dan bahkan meningkat menjadi kota kabupaten/kodya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan. Berdasarkan data Pusdatintrans dan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi, pada Tahun 2010 posisi Bulan November, data eks UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 97 kabupaten.

Setelah otonomi daerah, pada intinya sudah ada yang beralih ke model dalam teori transmigrasi yang eksklusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual mengikut sertakan masyarakat desa-desa yang berada di sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 15 Tahun 1997, PP. No 2 Tahun 1999 dan UU No. 29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan transmigrasi terdiri atas permukiman baru transmigrasi, desa-desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. Namun secara efisien masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigrasi yang berada didalam unit permukiman yang dibangun secara terkonsentrasi, dengan masyarakat sekitar atau setempat yang berada diluar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual, tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk perlakuan, program, dan iming (pemberian), yang bias ke warga yang di dalam unit permukiman transmigrasi. Sementara itu, penduduk desa sekitar masih terabaikan. Berbagai isu-isu mendasar tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Isu-isu tersebut juga menjadi faktor utama menurunnya kinerja transmigrasi sejak era Otonomi Daerah, karena sebagian daerah tidak lagi menempatkan program transmigrasi sebagai kebijakan prioritas.

Berdasarkan sifatnya dan cara kerjanya, transmigrasi merupakan program pembangunan yang secara langsung bersangkutan dengan membentuk sebuah kawasan. Produk akhir transmigrasi adalah terciptanya sebuah kawasan permukiman (kawasan pengembangan) yang diharapkan dapat maju, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Secara teoretik, kehadiran program transmigrasi sesungguhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat sebagai suatu

bentuk penambahan ruang ekonomi, sekaligus penambahan penduduk dalam hal sumber daya manusia.

Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru merupakan bagian dari Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang mengalami proses transmigrasi, proses transmigrasi tersebut terjadi pada Tahun 1998. Para transmigran adalah Suku Jawa yang didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat seperti, Solo, Pakalongan, Banyumas, Seragen, Malang, Kediri, Banyuwangi, Jombang, Blitar, Pasuruan, Sukabumi dan Bandung. Alasan utama para transmigran mengikuti program transmigrasi yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga di sebabkan padatnya penduduk di Jawa, kehidupan yang tidak mencukupi di daerah asal dan bencana alam seperti gunung meletus. Suku Jawa mulai menetap di Kepenghuluan Labuhan Tangga melakukan pengembangan wilayah dengan cara membuka lahan pertanian padi yang bibitnya diperoleh dengan cara membeli dari luar daerah seperti Padang. Hal ini tentu memberikan dampak bagi masyarakat tempatan, yang dimana dengan dibukanya wilayah baru yang di huni dan di kembangkan oleh imigran. Data Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru 2014

Selain dampak positif yang diberikan oleh program transmigrasi di wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, transmigrasi di wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru mengalami benturan sosial budaya yang sangat kuat, tidak hanya itu, masalah lahan yang menjadi pemicu konflik pun dapat terjadi, hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih masyarakat mengenai lahan-lahan yang ada di wilayah transmigrasi, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara menyeluruh dan masyarakat transmigran dan masyarakat tempatan

mendapatkan haknya masing-masing secara adil, tentunya dalam hal ini melibatkan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dampak dari transmigrasi didalam perkembangan wilayah di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru di Kabupaten Rokan Hilir*”, sehingga dapat diuraikan pengaruh dari transmigrasi terhadap Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kabupaten Rokan Hilir.

Dari gambaran latar belakang ini, sangat penting untuk melakukan kajian lebih lanjut dan perlunya sebuah arahan dalam melihat Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dalam agama Islam juga disebutkan betapa pentingnya transmigrasi dalam perkembangan Wilayah, pentunjuk Allah swt melalui Al-Quran. Disalah satu ayat yg menekankan bahwa ;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). QS, Ar – Rum Ayat 41 - 42

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh transmigrasi terhadap masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

- a. Terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat Transmigrasi dengan masyarakat lokal.
 - b. Perbedaan antara budaya lokal dengan budaya yang di bawa oleh Transmigran.
 - c. Asimilasi atau pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru dan bergotong royong saling membantu, bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan.
 - d. Kesempatan memperoleh pekerjaan sampingan.
2. Terdapat perubahan dalam perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko.
 - a. Laham kosong dapat dimanfaatkan.
 - b. Penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya dapat leih baik secara ekonomi.
 - c. Meningkatnya produksi terutama dibidang pertanian.
 - d. Dapat mempercepat pemerataan penduduk.
 - e. Mengurangi jumlah pengangguran, terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan.

Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pengaruh transmigrasi terhadap masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasi pengaruh transmigrasi terhadap masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
2. Teridentifikasi pengaruh transmigrasi dalam perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua elemen diantaranya:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dan bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan program-program daerah.
2. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi pengembangan wilayah transmigrasi
3. Sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang studi pengembangan wilayah dan kondisi transmigrasi di wilayah penelitian khususnya di Riau umumnya.
4. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang mencakup tentang pengaruh dan dampak transmigrasi di Rokan Hilir umumnya dan Kepenghuluan Labuhan Tangga khususnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan,

sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

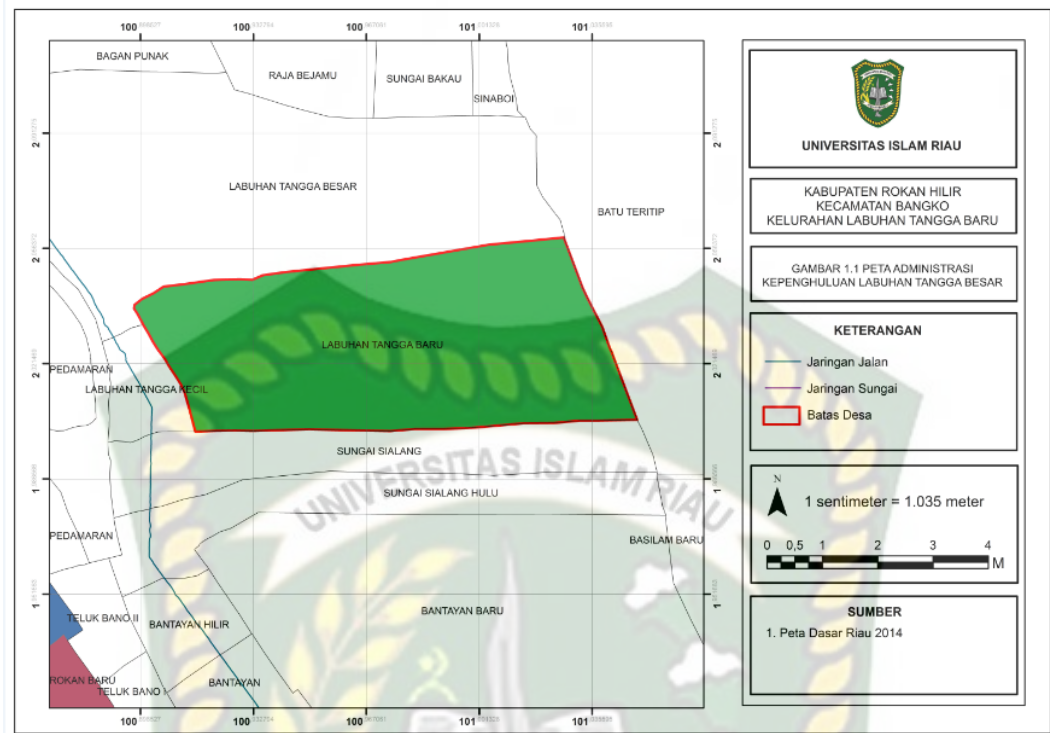
Kajian materi sebagai ruang lingkup materi ialah pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan wilayah masyarakat Labuhan Tangga Baru dengan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif dalam pemaparan hasil penelitian. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengidentifikasi pengaruh apa saja yang terjadi oleh transmigrasi terhadap masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir mengenai pengaruh perkembangan ekonomi terhadap Wilayah masyarakat, pengaruh antara budaya lokal dengan budaya yang di bawa oleh transmigran, asimilasi atau pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru dan sifat saling membantu atau gotong royong untuk perkembangan wilayah masyarakat serta kesempatan masyarakat lokal memperoleh pekerjaan sampingan kepada transmigran.

Kemudian peneliti juga mengidentifikasi pengaruh transmigrasi dalam perkembangan wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yakni mengenai pemanfaatan lahan kosong, produksi dibidang pertanian, pemerataan penduduk, serta jumlah pengangguran yang berada di Wilayah penelitian.

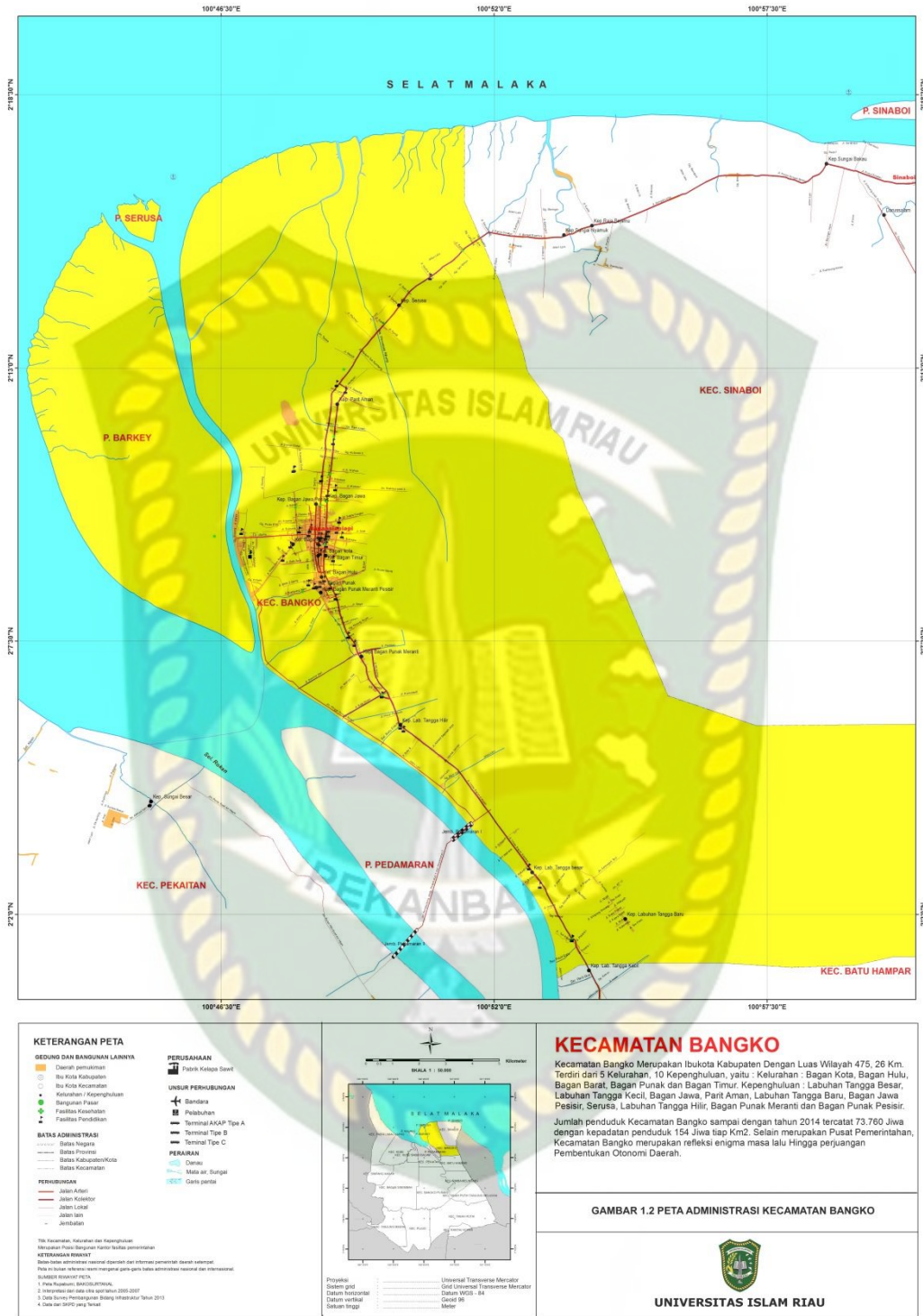
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah didalam penelitian ini adalah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan jumlah penduduk Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebanyak 1472 jiwa dari 500 kepala keluarga, adapun batas wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru adalah :

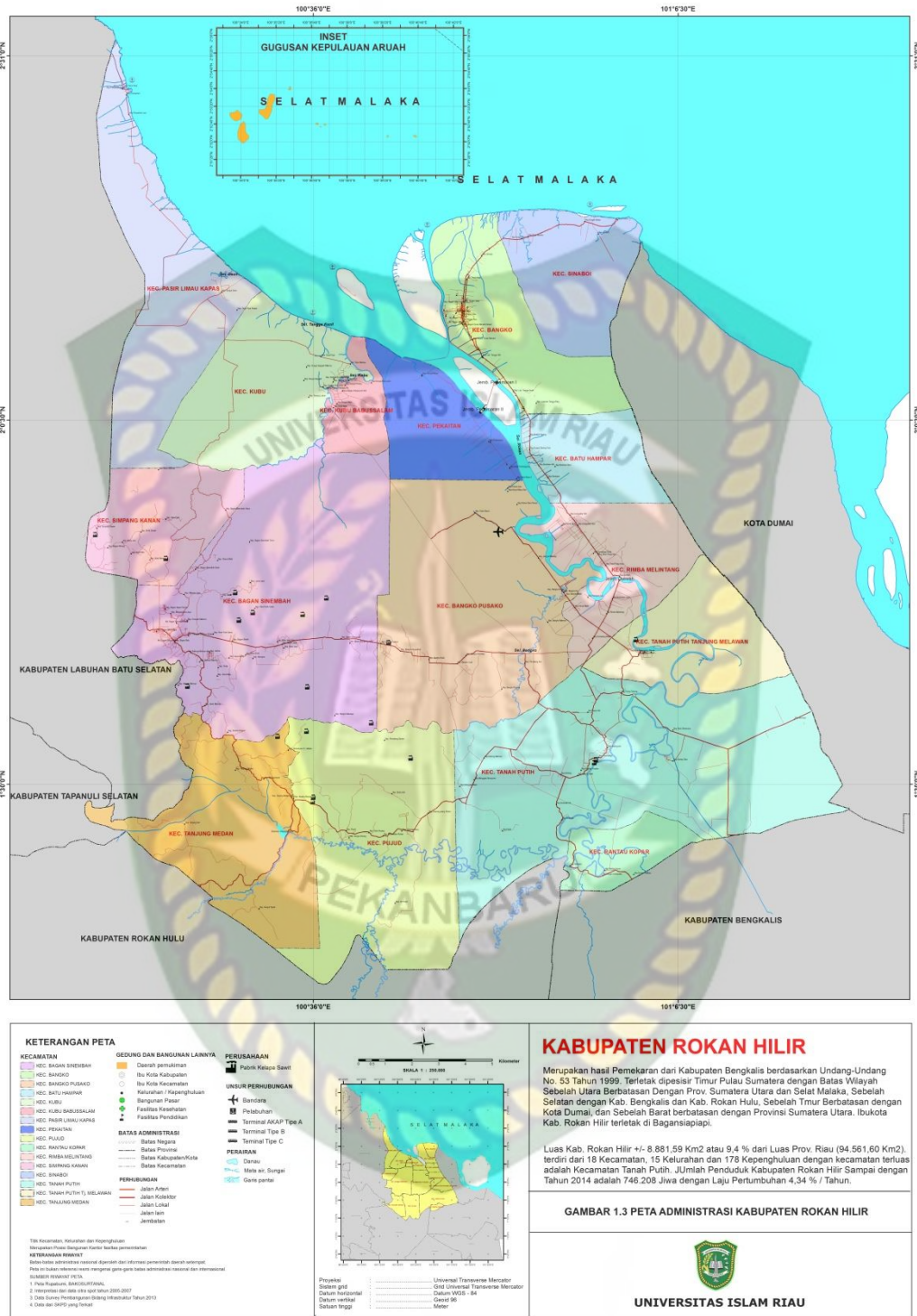
- a. Sebelah U : Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
- b. Sebelah S : Kepenghuluan Sungai Sialang.
- c. Sebelah B : Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- d. Sebelah T : Kepenghuluan Batu Teritip.



GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU



GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BANGKO



GAMBAR 1.3 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ROKAN HILIR

1.5.3 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam ini adalah

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi studi penelitian, permasalahan-permasalahan yang ada tujuan dan manfaat didalam peneltian serta ruang lingkup penelitian yang hendak di sajikan. pada bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Tinjauan teori ini ialah penegasan landasan teori yang dipilih penelitian dalam penelitian tersebut, tinjauan teori diperlukan untuk menegaskan landasan teori penelitian yang akan dilakukan pada tugas akhir yang akan penulis teliti. Dengan demikian jika terdapat beberapa aliran dalam sebuah pendekatan maka penelitian harus mengemukakan alasan memilih aliran tertentu. Kemutakhiran berkaitan dengan dimensi waktu yang berkaitan dengan teori – teori dari tugas akhir tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda beda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Dalam metodologi penelitian selalu

berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara – cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini di bahas mengenai gambaran umum daerah penelitian yang dapat menggambarkan kondisi wilayah penelitian. Deskripsi wilayah penelitian merupakan gambaran umum mengenai wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Data deskripsi wilayah dalam penelitian ini sebagai besar diambil dari data monografi rencana pembangunan jangka menengah Labuhan Tangga Baru tahun 2018 – 2023. Data selanjutnya di dapati dari hasil wawancara dan data quisioner dengan masyarakat transmigrasi dan masyarakat local yang berada di daerah penelitian, selain dari itu data yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi wilayah yang diteliti dapat dilihat dengan cara melakukan observasi dengan mendokumentasikan wilayah tersebut di berbagai sudut agar mendapatkan hasil yang cukup agar memudahkan penulis untuk meneliti wilayah tersebut.

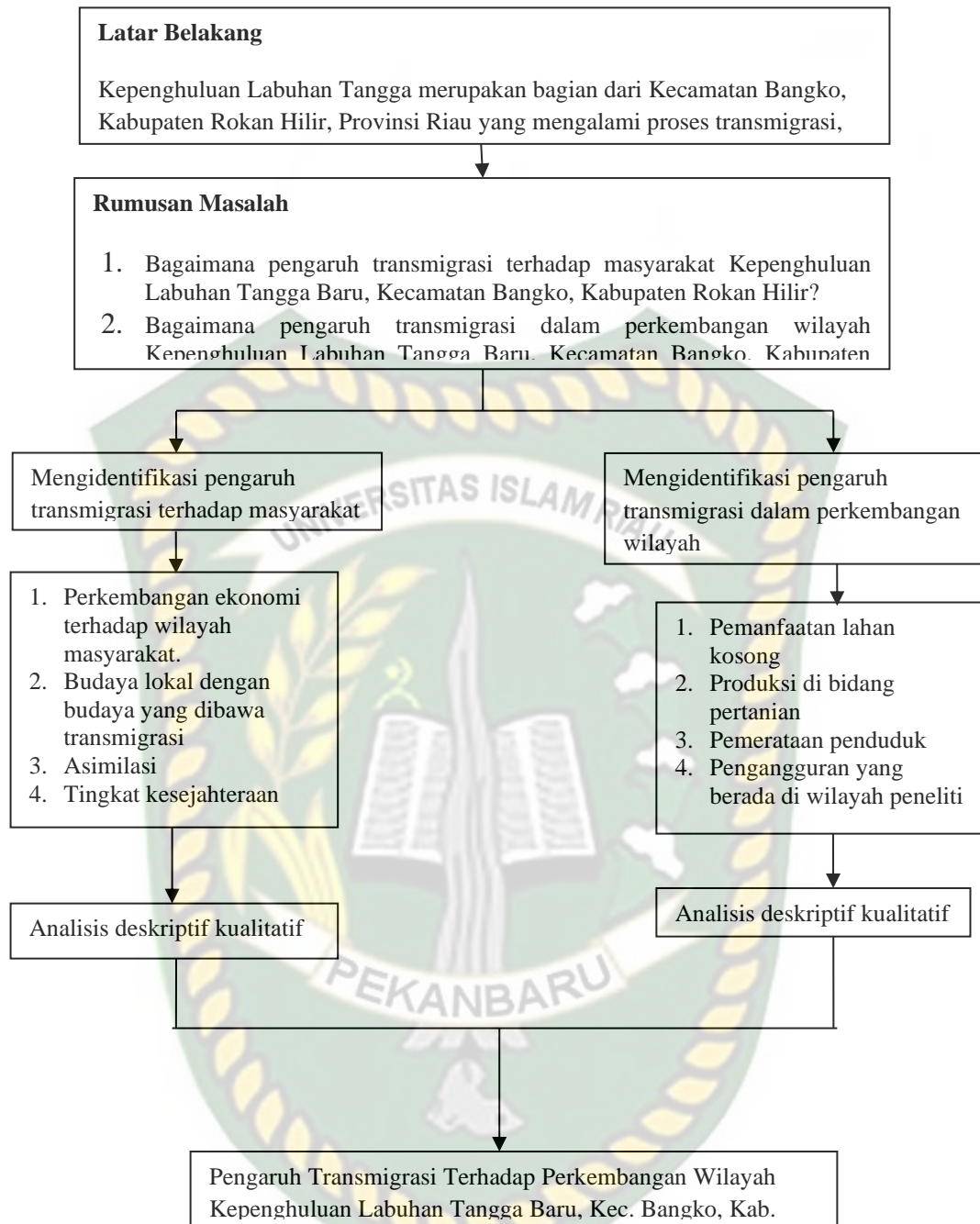
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Hasil pembahasan hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks objektif atau subjektif, hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan,

untuk dijadikan sebagai sebuah teori. Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat transmigrasi yang terdapat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dan masyarakat local yang berada di wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Masyarakat dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dari populasi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 500 kepala keluarga dan sampel yang diambil penelitian sebanyak 83 Kepala Keluarga.

BAB VI : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Hasil yang didapatkan dalam suatu penelitian adalah kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan itu, didapatkan juga saran untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Kesimpulan tersebut pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Pada bagian kesimpulan dan saran, peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesis dan analisis data. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian karena pada bagian ini peneliti berusaha memberikan jawaban atas pernyataan masalah penelitian.



Gambar 1.4 Kerangka Berfikir

Sumber : Hasil Analisis, 2018

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [An Nisaa' (4): 100]

2.1 Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi adalah salah satu bentuk perpindahan yang diatur dan didanai oleh pemerintah serta ditetapkan melalui undang-undang. Berdasarkan undang-undang RI No. 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan transmigrasi menyatakan bahwa: "Transmigrasi adalah perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah.

Menurut Keyfitz dan Nitisastro (2001), Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa. Jadi berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk untuk pemerataan di setiap sudut wilayah agar kepadatan penduduk dapat diatasi yang ditetapkan oleh pemerintah

dengan tujuan pencapaian kemakmuran atau alasan – alasan yang dilihat perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam undang – undang.

Sedangkan menurut Heeren (2000) Transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang banyak atau padat penduduknya ke daerah yang sedikit jarang penduduknya dalam batasan negara dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui, ini mengartikan apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada seharusnya ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya. setiap warga Negara Republik Indonesia dengan kemauan sendiri dipindahkan atau pindah dari daerah padat ke daerah yang jarang untuk mengutamakan pembangunan.

2.1.1 Syarat Transmigran

Menurut Flo (2015) Program transmigrasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, tidak hanya itu program transmigrasi juga dapat meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah. Untuk menjadi transmigrasi harus dapat memenuhi syarat – syarat yang tertera dalam sembilan syarat transmigrasi, antara lain :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Telah berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah, KTP dan kartu keluarga.
4. Berusia 18 sampai dengan 50 Tahun (usia produktif).
5. Belum pernah bertransmigrasi.
6. Berbadan sehat jasmani dan rohani.

7. Memiliki keahlian / keterampilan sesuai kebutuhan daerah penempatan.
8. Memperoleh rekomendasi / legalitas dari Kepala Desa, Camat dan Kepolisian setempat.
9. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigrasi dan mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, lokasi permukiman yang dapat di singgahi yakni tempat yang berpotensi ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk menyokong pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

2.1.2 Tujuan Transmigrasi

Kepadatan penduduk yang tidak tersebar di setiap wilayah menyebabkan pemerintah merencanakan program transmigrasi. Pada Undang-Undang No 5 Tahun 1969 menetapkan Undang-Undang Tentang Ketetapan – Ketetapan Pokok Transmigrasi. Pada BAB II Kebujaksanaan Umum Transmigrasi dan BAB VI Daerah dan Keadaan Transmigrasi.

Pada Bab II pasal 2 sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditunjukkan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarya (spontan) yang beratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai:

- a. Peningkatan taraf hidup.
- b. Pengembangan daerah.
- c. Keseimbangan penyebaran Penduduk.
- d. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
- e. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia.

- f. Kesatuan dan persatuan Bangsa.
- g. Memperkuat pertahanan dan keamanan Nasional.

Bab VI pasal 10 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi dan Pertahanan-Keamanan serta atas usul menteri, daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai daerah asal dengan keputusan Presiden. (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015) :

- a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi, dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul menteri, daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran dapat ditetapkan sebagai daerah transmigran dengan keputusan Presiden.
- b. Daerah transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Yang ada di atasnya, oleh menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberi pengelolaan atas tanah tersebut kepada menteri.
- c. Akibat penbebasan hak tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 Pembinaan dan pengembangan masyarakat daerah dan pengembangan masyarakat Daerah Transmigrasi di selenggarakan dengan pola pembangunan masyarakat desa:

- a. Di bidang ekonomi dijuruskan kearah tercapainya tingkatan swa-sembada berdasarkan azas-azas perkoperasian.
- b. Di bidang budaya dijuruskan kearah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh.

- c. Di bidang mental spritual dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari kutipan diketahui kalau tujuan utama transmigran tujuan utamanya adalah untuk memakmurkan para transmigran dan masyarakat yang berada disekitar transmigran, pemeratakan pembangunan daerah serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dari segi soial maupun ekonomi.

Menurut Organisasi Org. Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia (2005) tujuan transmigrasi didalam poin-poin berikut :

- a. Untuk meratakan persebaran penduduk diseluruh wilayah.
- b. Untuk pertahanan keamanan/ hankam lokal Nasional.
- c. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi sasaran transmigrasi itu adalah untuk meratakan persebaran penduduk, memberikan bantuan kepada penduduk untuk menaikkan derajat hidup, untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi dan pertanian yang baru, membuka lapangan kerja, memanfaatkan sumber-sumber daya alam serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tercapai suatu pertahanan dan keamanan nasional.

2.1.3 Jenis-jenis Transmigrasi

Berdasarkan persatuan pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi BAB III pasal dinyatakan bahwa: “Transmigrasi dapat berupa transmigrasi umum dan transmigrasi spontan (swakarsa) adalah transmigrasi yang pelaksanaannya ditanggung oleh yang bersangkutan atau

pihak lain yang bukan pemerintah Republik Indonesia. Bantuan yang diberikan kepada peserta transmigrasi umum biayanya perjalanan, tempat tinggal, tanah seluas 2 hektar, serta biaya hidup sampai para transmigran memperoleh hasil panen pertama.

Menurut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan (2019) Transmigrasi dilakukan oleh beberapa atau banyak orang dengan berbagai macam tujuan yang berbeda – beda karena berbagai faktor yang berbeda inilah maka jenis – jenis transmigrasi juga ada banyak. Berbagai jenis transmigrasi ini antara lain sebagai berikut ;

a. Transmigrasi Lokal

Transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Seperti namanya, yakni lokal, maka transmigrasi ini dilakukan oleh orang – orang yang masi dalam satu wilayah. Wilayah yang di maksud ini adalah dalam lingkup provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Transmigrasi ini biasanya dilakukan atas dukungan biaya dari departemen transmigrasi. Transmigasi lokal ini bisa juga dilakukan secara masal.

b. Transmigrasi Swakarya

Transmigrasi swakarya ini seperti sebuah transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Jadi, transmigrasi swakarya merupakan jenis transmigrasi yang program dari departemen transmigrasi yang berupa jaminan hidup kepada transmigran selama beberapa bulan. Setelah itu maka transmigran akan diberikan tanah untuk dapat diolah dan tanah itulah

sebagai sumber dari penghasilannya. Dengan kata lain maka transmigrasi ini akan bersifat menetap bagi para transmigrasinya.

c. Transmigrasi Sektoral

Menurut pengertiannya maka transmigrasi sektoral ini merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaannya. Transmigrasi sektoral merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama – sama oleh para transmigran.

d. Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum merupakan salah satu jenis transmigrasi juga. Transmigrasi umum merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor – faktor pendorong yang berasal dari daerah asal. Misalnya karna sulitnya memperoleh pekerjaan karena sangat jarang ditemukan lapangan kerja, kemudian karena lahan sumber daya alam pertanian yang terlalu sempit sehingga membutuhkan pelebaran, hingga alasan pemerataan jumlah penduduk. Biasanya berbagai faktor pendorong yang ada didaerah asal ini akan membuat pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Maka dengan adanya transmigrasi umum ini penduduk atau transmigrasi bisa berangkat tanpa biaya karena biayanya semua adalah tanggung jawab dari pemerintah.

e. Transmigrasi Keluarga

Salah satu contoh dari transmigrasi mandiri adalah transmigrasi keluarga. Dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah melainkan dibiayai sendiri. Transmigrasi keluarga merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh pihak keluarga yang tinggal didaerah transmigran atau daerah yang dituju.

f. Transmigrasi Swakarsa atau Transmigrasi Spontan

Transmigrasi jenis ini merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan inilah transmigrasi yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan supaya rakyatnya yang bertempat tinggal ditempat – tempat yang terlalu ramai, kemudian mendapat kesadaran akan pentingnya meninggalkan daerah yang terlalu padat tersebut dan beralih ke daerah baru yang mana potensi alamnya perlu digali dan dikembangkan. Dengan demikian pemerataan daerah dapat kita peroleh dengan mudah.

g. Transmigrasi Bedol Desa

Transmigrasi bedol desa adalah salah satu transmigrasi yang melibatkan orang banyak atau massal. Disebut transmigrasi massal karena pelaku atau transmigrasinya ini banyak atau lebih dari satu orang. Dinamakan transmigrasi bedol desa apabila transmigrasi dilakukan oleh orang – orang dari suatu desa beserta dengan pengurus pemerintahan dari desa tersebut. Sehingga perangkat dan warga masyarakatnya akan berada ditempat yang baru tersebut, biasanya transmigrasi bedol desa ini dilakukan oleh orang – orang yang desanya terkena imbas proyek dari pemerintahan. Transmigrasi bedol desa ini dilakukan dengan biaya dari pemerintah dan akan disediakan fasilitas oleh pemerintahan pula.

Itulah beberapa macam transmigrasi yang ada di Indonesia. Jenis – jenis transmigrasi tersebut bisa dikelompokkan atas tujuan atau biaya yang dikeluarkan pada saat transmigrasi tersebut berlangsung. Transmigrasi merupakan program dari pemerintah meskipun beberapa juga merupakan keinginan pribadi. Transmigrasi

tentunya disertakan oleh pemerintah untuk tujuan yang baik namun sayangnya banyak orang yang masih tidak menginginkan transmigrasi, bahkan tidak menanggapinya dengan serius mengenal program transmigrasi ini.

2.1.4 Pengaruh Transmigrasi

Dapat kita simpulkan dari sini bahwa pembangunan adalah cara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hasil pembangunan setidaknya dapat di nikmati oleh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin secara adil dan menyeluruh. Sebaliknya berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat tergantung kepada peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Dengan begitu pembangunan seharusnya dilaksanakan secara merata dan menyeluruh oleh lapisan masyarakat.

Permasalahan yang belum ditangani tersebut antara lain adalah cepat peningkatan pengembangan ekonomi di daerah tertentu, peningkatan yang lebih cepat dari kelas ekonomi lemah, pembinaan koperasi peningkatan produksi pangan, transmigrasi perumahan serta berbagai masalah social lainnya. Pelaksanaan program transmigrasi merupakan salah satu penunjang terhadap suksesnya pembangunan nasional. Dimana mana semenjak lahirnya orde baru programnya disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan pemerintah tentang transmigrasi ini mempunyai peranan penting bagi berhasilnya usaha pembangunan. Transmigrasi selain mengurangi kepadatan penduduk juga memperluas kesempatan kerja, pembangunan daerah, menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional.

Program transmigrasi diharapkan bertambahnya kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat yang berada di

sekitar lokasi pemukiman transmigrasi, sebagaimana program transmigrasi juga di tujuakan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Dengan begitu jelaslah maka untuk mencapai sukses di bidang pembangunan desa utamanya melalui program transmigrasi, diperlu kan adanya keikutsertaan masyarakat, baik dari masyarakat transmigrasi itu sendiri maupun masyarakat setempat serta adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah.

2.1.5 Teori dan Konsep Tentang Transmigrasi

Transmigrasi selaku tindakan perpindahan penduduk yang mengarah kepada pembangunan tidak terlepas dari permasalahan yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia adapun masalah yang di hadapi adalah masalah kependudukan, pembangunan dan social ekonomi. Ketiga maslah tersebut satu sama lain saling berkaitan.

Menurut pendapat Keyfitz dan Nitisastro dalam Sofyan (3013) transmigrasi dalam arti perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa. Sedangkan menurut pendapat Heeren dalam Sofyan (3013) transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya kedaerah yang jarang penduduknya dalam batas Negara dalam rangka prosedur dalam negeri untuk pencapaian penyebaran penduduk yang lebih setara.

Dari sebagian penjelasan bauh fikir para ahli, ini berarti jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujuakan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 (merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, tentang pokok-pokok transmigrasi). Tentang ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut maka transmigrasi masih sangat relevan di era otonomi daerah saat ini.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan : memakai transmigrasi, sebagai salah satu bentuk pergerakan penduduk, akan timbulnya pertemuan antara budaya golongan masyarakat sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat jalannya pembauran dan akulturasi. Proses ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadi Bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nasional.

Dengan demikian karena masalah penduduk ini adalah masalah yang sangat kompleks, maka sangatlah penting ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi dan transmigran adalah :

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

2.2 Sosial Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengubah dengan kemajuan yang sedang berkembang menuju tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pembangunan ialah pembaharuan kehidupan dan kegiatan disegala bidang, misalnya sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, lingkungan dan Hankamnas. Dengan maksud untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagaimana pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan keadilan, dalam rangka mewujudkan asas keadilan sehingga disatu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur melainkan juga untuk masyarakat yang adil.

Dalam penulisan ini penulis akan mengamati dari sudut pandang kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi. Sebelum membahas masalah kehidupan sosial ekonomi terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi sosial ekonomi. Mankiw dalam Sofyan (2013) menurut Ilmu ekonomi (economics) pada dasarnya adalah pelajaran tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada sebagian besar masyarakat, sumber-sumber daya bukan ditentukan oleh sebuah pelaksana perencana tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi yang terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian ekonomi ialah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari yang mereka beli, menabung, investasi, dimana yang

kesemuanya tersebut adalah untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan fasilitas sosial ialah aktifitas maupun materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kepuasan sosial, mental, dan spiritual. (Astuti, 2016)

Sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Republik Indonesia yang termaktup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh isi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 harus ditafsirkan sesuai dengan falsafah Pancasila yang merupakan suatu sistem guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menyangkut bidang ekonomi, tercantum jelas pada bab XIV pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Faktor Pendukung Sosial Ekonomi

Badan usaha yang menjadi pendukung sosial ekonomi diantaranya adalah koperasi, dimana Muryanto dan Budiono dalam Sofyan (2013) mengatakan:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Melihat dari posisi ekonomi negara yang sedang berkembang dalam dunia politik ekonomi dunia masih dibawah standard dibandingkan Negara – Negara yang

sudah. Maka untuk jangka waktu tertentu perlu diusahakan upaya-upaya guna menyusun keseimbangan ekonomi dunia antar bangsa, sehingga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara dalam suatu keluarga besar dunia dapat dicapai.

Muryanto dan Budiono (2000) menyebutkan salah satu program terpadu yang menginginkan suatu usaha dari dan menguntungkan semua pihak, unsur utamanya semua sama pentingnya. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Pemindahan besar-besaran sumber daya ke negara yang sedang berkembang.
2. Strategi energi internasional.
3. Beberapa pembaharuan utama dalam sistem ekonomi internasional.

Peraturan-peraturan di atas tidak terikat dan atas dasar kerja sama saling menguntungkan antar negara. Dimana sesuai dengan perumusan Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan menyusun tata perekonomian Indonesia. Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka (Standing, 2001), mengemukakan pendapatnya bahwa: “migrasi mencerminkan perubahan gaya hidup, perubahan dalam hubungan-hubungan sosial, perubahan dalam struktur produksi dan distribusi, serta perubahan dalam keluarga dan struktur kekerabatan untuk mengembangkan cara-cara subsistensi. Migrasi juga mendorong perubahan dalam masing-masing aspek kehidupan manusia itu, dengan pengertian tertentu sudah bersifat fungsional terhadap perubahan”.

2.3.1 Tingkat Taraf hidup

Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, secara bertahap melalui fasilitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, paket teknologi, pembinaan

sosial budaya dan ekonomi, serta kelembagaan yang diarahkan untuk peningkatan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigrasi. Oleh karena itu, perkembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan yang tersebar dipenjuru daerah dapat di simpulkan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan, dan dalam kurun waktu panjang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan (Puguh, 2002)

Penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Atau secara umum tujuan transmigrasi adalah untuk memindahkan dan menyebarkan penduduk, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigrasi, jadi kedepannya lokasi transmigrasi menjadi pusat pembangunan wilayah.

2.3.2 Pendapatan

Tingkat penghasilan transmigran merupakan salah satu parameter kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat transmigran yang berada dibawah garis kemiskinan, dengan cara menimbang-nimbang pendapatan rata – rata transmigran dengan suatu standart garis kemiskinan. Namun, pada kenyataannya melihat kesejahteraan lebih luas dari pada tingkat pendapatan. Pendapatan hanya melihat nilai barang dan jasa yang dihasilkan keluarga transmigran setelah dikurangi biaya – biaya yang dikeluarkan. Sedangkan dalam tingkat kesejahteraan termasuk didalamnya ukuran kenyamanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, integrasi sosial maupun kesungguhan dan pelayanan lembaga sosial. Untuk menilai tingkat kesejahteraan transmigran

perlu memperhitungkan aspek ekonomi maupun sosial budaya agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai keberhasilan transmigran.

Kajian taraf kesejahteraan transmigran dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui tingkat kesejahteraan transmigran secara ekonomi maupun sosial dan sekaligus sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan, program dan proyek yang diselenggarakan dari tahun ke tahun. Disamping itu juga dilakukan perbandingan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menggunakan tolok ukur garis kemiskinan nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat kita lihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran telah mencapai sasarannya. Informasi kesejahteraan transmigran akan memperlihatkan UPT – UPT yang transmigrannya kurang sejahtera dibandingkan dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun bina tertentu, bertepatan dapat dipergunakan untuk membandingkan keberhasilan antar UPT maupun dengan sistem nasional.

2.3.3 Budaya Lokal Dengan Budaya Transmigrasi

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak manusia cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang – orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan – perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.

Unsur – unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah. Migrasi juga mempunyai beberapa golongan tertentu yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Perpindahan penduduk didalam satu daerah. Sedangkan kebudayaan itu merupakan keseluruhan dari pengetahuan masyarakat sebagai mahluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, untuk memenuhi segala kebutuhannya serta mendorong terwujudnya kelakuan masyarakat itu sendiri.

2.3.4 Asimilasi

Asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha – usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha – usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan berikut:

1. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda.
2. Terjadi pergaulan antarindividu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama.

3. Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.

Interaksi sosial transmigrasi dengan masyarakat lokal menimbulkan dua proses yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Pada proses interaksi sosial yang terjadi kerja sama dalam bentuk hubungan kerja saling tolong menolong, gotong royong. Sedangkan pada proses disosiatif bentuk interaksi terjadinya konflik antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu musyawarah yang dilakukan. Dampak positif dan negatif dari interaksi sosial transmigrasi dengan masyarakat lokal menyebabkan keanekaragaman budaya dan meningkatkan kebersamaan.

2.3.5 Masyarakat

Definisi tentang masyarakat tidak asing kita dengar, seperti: masyarakat desa dan masyarakat kota. Meskipun secara mudah dapat kita artikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap. Istilah masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut (*Society*). Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Gillin dalam Sofyan (2013) merumuskan bahwa masyarakat atau *society* adalah “ *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes. And feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi itu menyerupai unsur “kesatuan hidup” dalam definisi kita. Unsur *common customs, traditions* adalah unsur “adat-istiadat”, dan unsure “kontinuitas” dalam definisi kita. Serta unsur

common attitudes and feeling of unity adalah sama dengan unsur “ identitas bersama ”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur *the largest* yang berarti “ terbesar”.

Marx dalam Sofyan (2013) masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni teknik dan karya. Linton dalam Sofyan (2013) masyarakat ialah setiap kumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan bisa mengadakan keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka memandang sebagai satu kesatuan sosial. Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut.

1. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri, setidaknya terdiri atas dua orang.
2. Berteman dengan waktu yang cukup lama. Berdampak karna hidup bersama, timbul rasa dan sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
3. Mengetahui bahwa mereka adalah satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

2.3.6 Tingkat Kesejahteraan

Menggambarkan persepsi yang dipakai untuk menyatakan kategori hidup seseorang pada suatu wilayah pada masa priode tertentu. Konsep kesejahteraan memiliki sifat yang berhubungan, yaitu tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Keadaan sejahtera yang di miliki seseorang dapat berbeda dengan keadaan sejahtera orang lain. Tercapainya

kebutuhan makan sehari-hari tiap hari untuk seorang pekerja buruh adalah dapat dikatakan sejahtera, namun lain halnya dengan seorang pengusaha besar.

Fahrudin (2012) kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin.

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Badan Pusat Statistik (2013) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tujuh indikator antara lain:

- a. Kependudukan
- b. Pendidikan, ada 3 yaitu:
 1. Angka partisipasi sekolah
 2. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan
 3. Angka buta huruf
- c. Kesehatan, ada 3 yaitu:
 1. Angka kesakitan
 2. Penolong kelahiran
 3. Angka harapan hidup
- d. Fertilitas dan keluarga berencana
- e. Pola konsumsi
- f. Ketenagakerjaan
- g. Perumahan

2.3.7 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi

Program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dimulai pada tahun 1998, program transmigrasi menghubungkan masyarakat transmigrasi yang berbeda kebudayaan sehingga kecemburuan sosial dan konflik antara warga dapat di minimalisir di tempat permukiman. Perpaduan masyarakat ini tidak melahirkan kecemburuan antara masyarakat karena mereka sepenanggungan dan di perlakukan sama dan tidak ada perbedaan dari awal masuk, selama di lokasi haknya sama dan adil. Masyarakat transmigrasi di bina dalam program pembaharuan dan pembangunan desa transmigrasi yang bertujuan untuk menaikkan kehidupan sosial ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi semua kebutuhan hidup baik kebutuhan sandang, pangan dan papan, selain itu rencana ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekurangan tenaga kerja, dan pembukaan lahan pertanian baru dalam upaya pemanfaatan sumber daya alm untuk tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera.

2.3.8 Kesehatan

Tjiptoherijanto dalam Giyarsih (2008) mengajukan karena kesehatan merupakan salah satu standard keberhasilan program transmigrasi. Kondisi kesehatan warga transmigran mempengaruhi kualitas hidup warga transmigran itu sendiri, Membaiknya tingkat kesehatan warga transmigran akan menunjukkan nilai tingkatan hidup dan keberhasilan program transmigrasi. Kondisi demikian memang sangat mungkin terjadi pada suatu lokasi unit pelaksana teknis (UPT). Dengan kondisi fasilitas seadanya, dalam arti tidak selengkap kondisi fasilitas yang ada di kota, memungkinkan warga sulit untuk memanfaatkan inovasi dalam bidang

kesehatan meski dengan fasilitas seadanya warga tetap menjaga kesehatannya berbekal pengetahuan yang di dapat dari pendampingan yang di selenggarakan oleh pihak dinas kesehatan.

2.3.9 Keamanan

Tjiptoherijanto dalam Giyarsih (2008) mengemukakan bahwa kondisi yang aman dapat membuat warga transmigrasi merasa betah untuk tinggal di unit pelaksana teknis (UPT). Meski keamanan dan keseriusan tentang kriminal di suatu tempat sulit untuk di ketahui dan di ukur secara pasti, tapi setidaknya kondisi keamanan dapat di lihat secara keseluruhan dalam keberhasilan program dengan beberapa informasi yang dapat di lihat sebagai pencapaian keamanan. Apabila, rendah atau tingginya angka warga yang merasa disakiti secara fisik, tidak adanya warga yang merasa kemalingan barang, tidak adanya warga yang merasa hidupnya tertekan, dan tidak adanya hak warga transmigrasi yang di ambil secara paksa, adalah merupakan informasi bahwa UPT merupakan yang aman sebagai tempat tinggal. Warga transmigrasi yang tidak merasa nyaman tinggal di UPT akan pergi. Jadi, keamanan warga yang tinggal di UPT haruslah di perhatikan.

2.3.10 Kemandirian

Sumodiningrat dalam Giyarsih (2008) Mengatakan tiga tingkatan mandiri yaitu kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen. Kemandirian material merupakan kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar pada waktu krisis. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk kekusaan dari pihak luar, kemandirian manajemen merupakan kemampuan untuk membina diri dan menjalani serta mengatur kegiatan bersama-sama. Warga transmigrasi, apabila

di pandang dari segi komunitas, mereka adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai pekerjaan selaku petani. Dengan adanya pendampingan maka warga transmigrasi diberikan pendidikan dan pendampingan agar kapabilitasnya dapat bertambah dan berkembang. Peningkatan kapabilitas inilah yang di harapkan agar warga dapat melakukan segala aktifitas dan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan kemampuan sendiri.

Jiwa mandiri yang tumbuh dikalangan warga transmigrasi diantaranya dapat dilihat dari upaya pengembangan lingkungan rumah tinggal, misalnya dalam hal pengembangan rumah hunian dan halaman rumah. Selain itu juga dalam hal pengadaan barang kebutuhan rumah tangga seperti pengadaan kompor gas, lemari, kursi, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang pada penempatan awal tidak diberikan. Jika di pandang dari sisi yang lain lagi warga transmigrasi juga sudah mandiri seperti halnya sudah sudah lepas dari bantuan sandang dan pangan yang diberikan oleh pemerintah, karena bantuan yang di terima oleh warga transmigrasi hanyalah pada tahun pertama mereka memasuki lokasi transmigrasi saja setelah tahun selanjutnya mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan makan sendiri. Kemandirian ini juga dapat tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan.

2.3.11 Kepemilikan Aset

Seperti halnya kita ketshui bahwa warga yang mengikuti program transmigrasi lokal ini akan mendapat aset berupa tanah untuk dikelola menjadi perkebunan sawit seluas 1 hektar dan mendapat seperempat hektar luas lahan yang digunakan untuk rumah beserta perkarangannya yang tentunya mereka juga mendapatkan rumah dan sudah ada sebagian warga yang melakukan renovasi terhadap rumah mereka baik penambahan luasan dapur maupun bagian depan rumah

seperti teras dan ruangan lainnya. Selain aset yang di dapat dari pemerintah sebagai bantuan kepada warga transmigrasi sebagian besar juga warga sudah ada yang mampu membeli barang yang berupa aset mereka. Walau bukan berbentuk perhiasan atau tanah di lokasi lain di luar wilayah transmigrasi namun aset yang mereka dapat beli dengan sendiri ini berupa kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik yang ada di dalam rumah mereka yang dapat mereka jual kembali jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana untuk keperluan mereka.

Selain aset di atas warga transmigrasi juga memiliki aset berupa hewan ternak sapi yang mereka kelola secara swadaya dengan kelompok tani mereka. Ada sebagian warga transmigrasi juga sudah memiliki ternak secara perorangan walaupun berupa ayam dan bebek namun ternak ini sudah bisa mereka jual dan mereka jadikan uang jika terdapat kebutuhan yang mendesak akan uang. Dari ketiga faktor di atas sudah menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan taraf hidup warga transmigrasi menuju kearah sejahtera. Walaupun pada perhitungan tingkat kemiskinan yang di lakukan pada pembahasan di atas masih menggolongkan warga transmigrasi ini kedalam tergolong miskin.

2.4 Pengembangan Wilayah

Tarigan dalam Setyorini (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan cara yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pada pendekatan sektoral dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut, sedangkan pada pendekatan regional melihat pada pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Friedman dan Allonso (2008) pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam

dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1 Pengaruh Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah

Peran transmigrasi terhadap pengembangan wilayah dapat dilihat dalam hal pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi, karena adanya transmigrasi telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong, dan saluran drainase yang telah membuka isolasi wilayah yang selama ini tidak tersentuh pertumbuhannya. Dalam perjalanan panjang pelaksanaan transmigrasi, fakta – fakta yang ada menunjukkan berbagai keberhasilan program ini baik dari sisi tujuan demografis maupun non demografis. Namun demikian, berbagai stigma negatif juga menyertai perjalanan program transmigrasi ini, yang menyebabkan menurunnya kinerja transmigrasi sejak reformasi atau era otonomi daerah, penolakan transmigrasi diberbagai daerah. Transmigrasi sebagai contoh yang “khas” dan strategi perkembangan wilayah yang asli di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah – daerah terutama dalam konteks pengembangan wilayah diluar pulau jawa.

Dalam konteks tersebut, maka diperlukan reorientasi pelaksanaan program transmigrasi. Reorientasi utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana menempatkan permukiman atau kawasan transmigrasi sehingga dapat benar – benar terintegrasi dengan wilayah – wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat eksklusif. Usaha – usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman

atau kawasan transmigrasi dengan wilayah – wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik spasial, sosial, ekonomi maupun budaya.

Ketrkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu memicu pengembangan wilayah khususnya wilayah – wilayah diluar pulau jawa. Untuk mendukung reorientasi pembangunan kawasan transmigrasi disertai dengan indikator – indikator pembangunan yang lebih komprehensif, baik menyangkut indikator perkembangan fisik, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial kapital dan lingkungan.

2.4.2 Stadia-Stadia Pembangunan

Transmigrasi Dilihat dari karakteristik dan cara kerjanya, transmigrasi merupakan program pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan sebuah kawasan. Produk akhir transmigrasi adalah terbentuknya sebuah kawasan permukiman (kawasan pengembangan) yang diharapkan dapat maju, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Dan secara teoretik, kehadiran program transmigrasi sesungguhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat sebagai suatu bentuk penambahan ruang ekonomi, sekaligus penambahan penduduk (sumber daya manusia). Program transmigrasi merupakan kasus pengembangan wilayah baru dari demand *side strategy*. Stadia - stadia pengembangan wilayah melalui *demand side strategy* yang dihipotesiskan oleh Rustiadi dkk (2009) dalam tujuh stadia sebagai berikut:

1. Stadia Sub-Subsisten Pada tahap pertama ini transmigran masuk dalam stadia sub-subsisten selama satu tahun. Pemerintah memberikan subsidi untuk

kebutuhan hidup dan produksi. Pada tahap ini pemerintah juga membangun berbagai fasilitas infrastruktur dasar dan pertanian.

2. Stadia Subsisten Transmigran masuk dalam stadia subsisten dengan bermodal lahan pekarangan dan Lahan Usaha I. Pada tahap kedua ini, transmigran diharapkan dapat berproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri (subsisten).
3. Stadia *Marketable Surplus* dengan adanya peningkatan sistem produksi diharapkan transmigrasi akan memasuki stadia marketable surplus (hasil usaha tani telah melebihi kebutuhan keluarganya) terutama setelah dapat diusahakannya Lahan Usaha II.
4. Stadia Industri Pertanian Surplus hasil pertanian yang dicapai pada tahap ketiga memerlukan pengembangan industri pengolahan terutama untuk memenuhi permintaan atas barang-barang olahan utama. Adanya industri hasil pertanian skala kecil ini akan meningkatkan permintaan hasil pertanian, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk menjual ke kota.
5. Stadia Industri Non-Pertanian Peningkatan pendapatan transmigran yang diperoleh dari tahap 4 akan meningkatkan konsumsi produk-produk pertanian. Hal ini akan mendorong tumbuhnya industri-industri non-pertanian skala kecil.
6. Stadia Industrialisasi Perdesaan atau Urbanisasi Kota Kecil/Menengah Pada tahap ini, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang mewah. Oleh karenanya akan berkembang industri-industri umum.

Ketidak optimalan dan keragaman pencapaian stadia pengembangan wilayah transmigrasi ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan tujuan program transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan daerah. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

(menghambat/mendorong) stadia-stadia tersebut pada kawasan transmigrasi, sehingga program transmigrasi dapat diarahkan dan diandalkan menjadi program unggulan dalam pembangunan daerah.

2.4.3 Pemanfaatan Lahan Kosong

Langkah kebijaksanaan transmigrasi selain ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk mengusahakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Usaha tersebut dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan baik di daerah asal maupun di daerah penerima, akan ditingkatkan peranan transmigrasi dalam usaha memindahkan penduduk dari wilayah – wilayah tertentu seperti kawasan hutan, kawasan pemukiman yang kritis dan kawasan yang terancam bencana alam. Di samping itu wilayah yang terkena proyek pembangunan, seperti pembangunan bendungan, juga diberi prioritas sebagai sumber penduduk yang akan dipindahkan.

Di daerah penerima pemukiman transmigrasi akan langsung dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan di sektor-sektor lain. Dalam hubungan ini maka direncanakan untuk lebih memanfaatkan hasil pembangunan dari sektor-sektor lain seperti irigasi, perkebunan, hutan industri, pedesaan dan industri. Penanganan pemukiman kembali penduduk yang masih hidup berpindah – pindah dan terpecar terus ditingkatkan agar menjadi petani yang menetap. Dalam usaha ini prioritas diberikan kepada petani yang mengerjakan lahan yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung dan suaka alam.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka usaha pembangunan transmigrasi diharapkan memberikan dampak yang positif baik bagi daerah asal maupun bagi daerah penerima. Secara langsung pelaksanaan transmigrasi sudah terkait dan

terpadu dengan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Transmigran yang pada umumnya berasal dari petani-petani yang tidak mempunyai tanah atau memiliki tanah yang sangat sempit akan memperoleh tanah dengan status yang jelas. Dengan pemilikan tanah tersebut transmigran dapat menggunakannya secara optimal serta mengelolanya lebih produktif sehingga produksinya dapat makin meningkat. Dengan usaha tersebut sekaligus terlaksanakan langkah – langkah kebijaksanaan yang dapat menghindari fragmentasi pemilikan dan pengusahaan tanah. (BAPPENAS, 2014)

2.4.4 Produksi Dibidang Pertanian

Setiap Kepala Keluarga akan dibukakan lahan seluas 1,25 ha yang terdiri dari 1 ha untuk lahan usaha I dan 0,25 ha untuk lahan pekarangan yang keadaannya siap tanam. Begitu pula diatas lahan pekarangan akan dibangun rumah seluas kira – kira 35 m². Diperkirakan selama dilaksanakan penyiapan lahan seluas 937.500 ha dan bangunan rumah sejumlah 750.000 buah. Di samping penyediaan lahan usaha, lahan pekarangan dan rumah, maka bagi setiap Kepala Keluarga transmigran disediakan sarana produksi pertanian berupa bibit padi 30 kg, bibit tanaman pekarangan 20 batang, pestisida dan racun tikus/babi 3 kg, pupuk urea dan TSP 300 kg serta pengapuran atau pemberian pospat alam. Pengapuran diberikan secara selektif pada lokasi-lokasi yang tingkat keasaman tanahnya cukup tinggi. Selama diperkirakan dibutuhkan sebanyak 22.500 ton bibit padi, 15 juta batang bibit tanaman pekarangan, 6.750 ribu ton pestisida dan 675.000 ton pupuk.

Disamping bantuan-bantuan tersebut di atas maka setiap 10 Kepala Keluarga akan dilengkapi dengan sebuah alat penyemprot hama. Selain itu akan dibangun pula sebuah balai penyuluh pertanian bagi setiap 4.000 Kepala Keluarga serta sebuah

kebun bibit bagi setiap 2.000 Kepala Keluarga. Dengan demikian diharapkan bahwa penyuluhan pertanian bisa lebih intensif dan kebutuhan bibit para transmigran akan dapat dipenuhi dari kebun bibit tersebut. Diperkirakan akan di-butuhkan sejumlah 75.000 alat penyemprot hama, 188 unit balai penyuluhan pertanian dan 375 unit kebun bibit. (BAPPENAS, 2014).

2.4.5 Pemerataan Penduduk

Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015) pentingnya peran transmigrasi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah khususnya di kawasan yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Pembangunan jangan hanya terkonsentrasi di pulau Jawa atau di kota-kota besar saja, tapi harus merata di seluruh pelosok Indonesia sehingga kesejahteraan bisa dinikmati seluruh rakyat, hal itu bisa kita wujudkan melalui program transmigrasi yang akan kita optimalkan pelaksanaannya. Pemerataan kesejahteraan diwujudkan melalui pembangunan ke wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Seperti wilayah terpencil yang tidak berpenghuni atau minim penduduknya. Sementara keberadaan penduduk merupakan faktor utama pembangunan di suatu wilayah. Melalui transmigrasi yang menempatkan penduduk secara permanen, pembangunan di wilayah tersebut akan semakin mudah dilaksanakan.

Program transmigrasi adalah solusi paling tepat, karena orang tidak hanya diajak pindah tapi diajak membangun wilayah baru tersebut menjadi wilayah yang aman nyaman dihuni, berkembang ekonominya, mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya dan masyarakat wilayah sekitarnya. Peran penting transmigrasi

secara nyata telah berhasil membangun wilayah-wilayah terpencil di luar Jawa menjadi kawasan pertanian yang tumbuh menjadi sentra-sentra produksi, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi wilayah-wilayah sekitarnya. Dari pusat pertumbuhan baru tersebut bahkan terbentuk pusat pemerintahan baru, tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan dua ibukota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, yaitu Mamuju ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

Penyelenggaraan transmigrasi berhasil menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru yang manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh warga transmigran pendatang, tetapi juga oleh warga asli yang ikut bekerja, berusaha, berpenghasilan, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Atas dasar itu, peran transmigrasi dalam pemerataan kesejahteraan akan dioptimalkan. Melalui pendekatan transmigrasi berbasis kawasan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis spasial atau produk unggulan tertentu, tetapi juga berorientasi pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan pendekatan berbasis kawasan yang komprehensif kita tidak hanya memindahkan orang untuk menggarap lahan agar menghasilkan produk-produk tertentu, tetapi kita ingin memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam kita secara lestari untuk membangun ekonomi yang mampu menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat di kawasan transmigrasi dan daerah sekitarnya.

Pembangunan nasional yang selama ini terkonsentrasi di Jawa, telah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa

khususnya di kawasan timur Indonesia. Peran penting transmigrasi adalah memecah konsentrasi itu melalui penataan mobilisasi penduduk untuk menempati dan membangun wilayah terpencil yang belum banyak tersentuh pembangunan, mengubahnya menjadi kawasan produktif yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Transmigrasi menjadi program andalan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat di berbagai daerah, dengan kesejahteraan yang makin merata di seluruh wilayah tanah air, maka kesenjangan sosial ekonomi juga akan makin menyempit.

2.4.6 Tingkat Pengangguran

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia berkisar pada sekurang- kurangnya lima macam ketidak seimbangan yang bersifat struktural. Pertama, masih tetap tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja produktif telah menyebabkan adanya kelebihan tenaga kerja secara umum dalam ekonomi Indonesia. Kedua, ketidak seimbangan dalam struktur umum angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja berusia muda merupakan bagian yang relatif besar didalam struktur angkatan kerja sehingga menimbulkan masalah penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja berusia muda yang pada umumnya masih kurang mempunyai pengalaman kerja. Ketiga, adanya ketidak seimbangan dalam penyebaran angkatan kerja secara geogra-fis dalam hubungannya dengan penyebaran potensi sumber alam, khususnya tanah pertanian, telah mengakibatkan hambatan-hambatan dalam memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara optimal. Keempat, masih adanya ketidak seimbangan di antara jenis dan jumlah tenaga yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah tenaga yang dihasilkan melalui sistem pendidikan dan

latihan. Kelima, pasar kerja yang belum berfungsi sepenuhnya dalam menyalurkan tenaga kerja secara ber-hasil guna dan berdaya guna.

Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan da-lam Garis-garis Besar Haluan Negara, telah dirumuskan tiga bentuk kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah ketenaga-kerjaan. Pertama, kebijaksanaan yang bersifat umum di bidang ekonomi dan sosial. Kebijaksanaan bidang ekonomi mencakup kebijaksanaan fiskal, moneter, investasi dan lain-lain yang diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja. Di bidang sosial, kebijaksanaan antara lain kebijaksanaan keluarga berencana bertujuan untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan sekaligus juga meningkatkan kualitas angkatan kerja. Kedua, kebijaksanaan pembangunan di berbagai sektor selalu diarahkan agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Misalnya, pembangunan di sektor pertanian selain diarahkan untuk meningkatkan produksi juga diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran. Ketiga, kebijaksanaan khusus yaitu langkah-langkah yang khusus ditujukan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan mutu tenaga kerja dalam waktu relatif pendek. Usaha-usaha yang ditempuh maupun sasaran langkah-langkah da-lam pelaksanaan kebijaksanaan khusus tersebut adalah :

- a. Memperluas kesempatan kerja produktif untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran dan menyediakan peker-jaan bagi angkatan kerja di pedesaan melalui Program Pembangunan Desa.
- b. Meningkatkan pembinaan dan penggunaan tenaga kerja secara efektif melalui Program Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.
- c. Membina dan meningkatkan keterampilan kejuruan untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang terbuka dalam proses pembangunan melalui Program Pendidikan Tenaga Kerja.

- d. Membina dan meningkatkan hubungan perburuhan yang serasi serta menyempurnakan perlindungan tenaga kerja melalui Program Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

2.5 Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “*transisi orisinal*”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001). Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap

sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*. Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi para Pxsu uncul berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004). Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (*dalam* Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*).

Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara

lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.

2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*).

Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.

3. Biaya transpor (*imperfect mobility of good and service*).

Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniu hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sektor theory*) dan teori tahapan perkembangan (*development stages theory*). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh

penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.

1. Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.

2. Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekspor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik.

3. Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya.

4. Tahapan pembentukan metropolis (*regional metropolis*). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.
5. Tahapan kemajuan teknis dan profesional (*technical professional virtuosity*). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (*economic reciprocating system*), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian “wilayah” yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran

antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata, 1999).

2.6 Sejarah Transmigrasi di Indonesia

2.6.1. Periode Kolonisasi

Dalam priode ini dilatar belakangi dengan gagasan “Politik Balas Budi” oleh Van Deventer dengan tulisan yang berjudul “Een Eere Schuld” yang menguraikan kemelaratan pulau Jawa akibat kerja paksa dan *culture stelse*. Priode kolonisasi dilaksanakan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke beberapa wilayah, diantaranya :

a. Lampung (1905 – 1941)

Rombongan pertama ditempatkan sebanyak 155 keluarga dari Bagelen, Karisedenan Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan Lampung yang sekarang ibu kota Kabupaten Pesawaran. Kolonisasi ke Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 KK : 25.718 jiwa), Jawa Timur (19.567 KK : 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain (eks buruh kontrak dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 87.367 jiwa kolonisasi di Lampung dilaksanakan beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahun 1905-1921, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah.
- b. Tahun 1921, Kota Agung dengan daerah Asal Jawa Tengah.
- c. Tahun 1922, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah.
- d. Tahun 1923, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah
- e. Tahun 1932-1941, Gedong Tataan dan Sukadana dengan daerah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain.

2.6.2 Periode Pelita (1969 – 1999)

a. Pelita I (1969/1970-1973/1974)

Arah yang di capai pembangunan transmigran masih mengacu pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang sebesar-besarnya. Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada masa ini ditetapkan pokok-pokok Ketransmigrasian dengan UndangUndang No. 3 tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Lembaga Transmigrasi.

b. Pelita II (1974/1975-1978/1979)

Pengelolanya adalah Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi. Orientasi pembangunan transmigrasi bukan hanya penyebaran penduduk, tetapi sudah diprogramkan kearah keterkaitan dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sector lain. Dari waktu ini dilaksanakan program pola sitiung. Pola sitiung ini berawal dari adanya transmigrasi bedol desa dari daerah wonogiri Jawa Tengah (meliputi 41 desa) ke empat desa baru di Kabupaten Sawah Lunto – Sijunjung Sumatra Barat, yaitu Sitiung, Tiumang, Sialanggaung, dan Koto salak. Penduduk dari 41 desa di Wonogiri tersebut dipindahkan karena desa tempat tinggal mereka terkena proyek bendungan Gajah Mungkur. Jumlah transmigran tersebut adalah lebih kurang 2.000 KK dengan 65.517 jiwa. Hal yang dinilai lebih dalam pola ini adalah adanya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait dengan pelaksanaannya. Misalnya penebangan hutan, membangun prasarana jalan, jembatan dan irigasi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, urusan pemerintahan desa oleh Departemen Dalam Negeri, pengkaplingan tanah hingga pembuatan sertifikat dilakukan oleh Jawatan Agraria, penegakan Puskesmas dan tenaganya oleh

Departemen Kesehatan, serta sekolah dan gurunya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan Pola Siting, transmigran tidak perlu membangun rumah dulu, karena rumah sudah disiapkan oleh Depnakertranskop. Begitu berhasilnya pola ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi, Prof. Soebroto bermaksud memperluas pola ini ke-14 provinsi lainnya di Indonesia. Namun, untuk menerapkan pola ini ke provinsi lain, kendalanya cukup banyak, diantaranya kesiapan lokasi transmigrasi dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik.

c. Pelita III (1979/1980-1983/1984)

Badan pelaksanaannya adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Orientasi pembangunan transmigrasi bergeser dari aspek sosial ke ekonomi, sehingga sector transmigrasi dialihkan dari bidang kesejahteraan sosial ke sektor ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1983, urusan transmigrasi menjadi departemen sendiri yaitu Departemen Transmigrasi.

d. Pelita IV (1984/1985-1988/1989)

Badan yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi sehingga kebijaksanaannya berada dalam satu lembaga dan sebagai pedomannya adalah "Panca Matra".orientasi pembangunan transmigrasi lebih diarahkan kepada peningkatan mutu permukiman transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, Peternakan serta ditingkatkannya kerjasama dengan swasta. Dalam pelita IV ini terdapat perubahan

kebijaksanaan dana proyek, yaitu hanya berlaku satu tahun anggaran yang sebelumnya lebih dari 3 tahun anggaran.

e. Pelita V (1989/1990-1993/1994)

Badan yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi Pengembangan pertanian tetap dilanjutkan namun lebih ditingkatkan terhadap pola perkebunan, perikanan, dan HTI.

f. Pelita VI (1994/1995-1998/1999)

Badan yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi dan PPH. Terjadi perubahan dalam orientasi pembangunan transmigrasi, yaitu lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperbanyak penyebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat pada umumnya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa itu dikenal adanya Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).

2.6.3 Periode Reformasi (tahun 2000-sekarang)

Pada Periode Reformasi, telah terjadi beberapa kali perubahan kabinet yang secara langsung berpengaruh terhadap orientasi dan paradigma transmigrasi. Sejak masa kabinet reformasi, terjadilah perubahan mendasar pada tataran politis (*political will*) yang kemudian berdampak pada program transmigrasi dalam pembangunan nasional. Transmigrasi diletakkan sebagai komponen pembangunan wilayah dalam pembangunan daerah. Kemudian dalam periode Kabinet Persatuan Nasional, transmigrasi telah melebur ke dalam konsep pembangunan multisektoral dan desentralisasi. Perubahan perpolitikan nasional dan bergulirnya reformasi, telah

menjadi prakondisi bagi terjadinya pergeseran posisi transmigrasi dari program sektoral transmigrasi menjadi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendorong persebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk semata, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah yaitu antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Lebih dari itu, penduduk setempat semakin diberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi transmigran (TPS) dengan proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus terdapat permukiman transmigrasi dengan TPS lebih dari 50%. Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Perlu adanya revitalisasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi agar kawasan transmigrasi berkembang dan selanjutnya terbentuk pusat pertumbuhan. Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang

mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Fungsi perkotaan diindikasikan dengan tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi :

- a. Pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
- c. Pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
- d. Pusat pelayanan kesehatan;
- e. Pusat pendidikan dan pelatihan;
- f. Sarana pemerintahan; dan
- g. Fasilitas umum dan sosial. Kota terpadu mandiri dirancang dengan pendekatan WPT/LPT pada kawasan yang sudah terdapat pembangunan.

Terkait dengan program transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui paradigma baru melansir lima kebijakan, yaitu :

- a. mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, melalui upaya peningkatan produktivitas lahan.
- b. Mendukung kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi.
- c. Mendukung ketahanan nasional, yaitu mengintegrasikan permukiman transmigrasi dengan masyarakat sekitar.
- d. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi/investasi dan pemerataan pembangunan.
- e. Menunjang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Transmigrasi sebagai salah satu program kependudukan di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dimulai dari jaman pemerintahan kolonial Belanda Tahun 1905 (dikenal dengan istilah kolonisasi) dengan sasaran utama selain untuk

mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa. Setelah kemerdekaan, pada awal orde lama, selain tujuan demografis, sesuai dengan Undang-undang No. 20/1960, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pada Orde Baru, tujuan utama transmigrasi semakin berkembang ke arah tujuan-tujuan non-demografis lainnya. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 menyatakan tujuan transmigrasi adalah: peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata keseluruh Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Pergeseran orientasi ke arah pembangunan wilayah menyebabkan permukiman transmigrasi didesain untuk ditumbuh kembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Pada era otonomi daerah, transmigrasi masih menjadi salah satu model pembangunan. Namun penyelenggaraan transmigrasi dihadapkan pada tantangan terkait dengan perubahan tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi telah menjadi sumber dari tekanan domestik untuk memperbaharui program transmigrasi. Penerapan otonomi daerah selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah.

Perubahan-perubahan tersebut telah melahirkan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 29 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan transmigrasi adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pencapaian waktu pelaksanaan program transmigrasi ini, kebenaran yang ada telah memperlihatkan keberhasilannya dalam berbagai sudut, baik dari aspek demografis maupun non-demografis. Dari aspek demografis, sejak era kolonisasi sampai era otonomi daerah saat ini telah ditempatkan sebanyak 2.115.309 Kepala Keluarga. Realisasi penempatan pada era kolonisasi (Tahun 1905 – 1942) sebanyak 60.155 KK, sementara itu pada orde lama (Prapelita) antara Tahun 1950 – 1968 sebanyak 98.631 KK. Pada orde baru, program transmigrasi mencapai puncak pelaksanaannya. Selama Pelita I – VI (Tahun 1969 – 1999), telah berhasil dikirimkan transmigran sebanyak 1.827.099 KK. Selanjutnya, selama era otonomi daerah, pada periode Tahun 2000 – 2004, telah ditempatkan transmigran sebanyak 87.571 KK, sedangkan pada periode tahun 2005 – 2009 telah ditempatkan transmigran sebanyak 41.853 KK. (Lihat Tabel 1 dan Gambar 1).

Dilihat dari Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata penempatan transmigran per tahunnya mulai dari era kolonisasi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sampai pada puncaknya pada Pelita IV. Pada Pelita V mengalami penurunan namun demikian pada Pelita VI kembali menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.1 Penempatan Transmigrasi Dari Era Kolonisasi Sampai Era Otonomi Daerah di Indonesia

No	Waktu Penempatan	/LPT UPT	Jumlah	Rata -Rata per tahun		
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Era Kolonisasi (1905 - 1942)	62	60155	232802	1583	6126
2	Pra Pelita Tahun 1950 - 1968	176	98631	394524	5191	20764
3	Pelita I (1969/1970-1973/1974)	139	40906	163624	8181	32725
4	Pelita II (1974/1975-1978/1979)	139	82959	366429	16592	73286
5	Pelita III (1979/1980-1983/1984)	767	337761	1346890	67552	269378
6	Pelita IV (1984/1985-1988/1989)	2002	750150	2256255	150030	451251
7	Pelita V (1989/1990-1993/1994)	750	265259	1175072	53052	235014
8	Pelita VI (1994/1995-1998/1999)	1109	350064	1400256	70013	280051
9	Era Otonomi Daerah					
	2000-2004	246	87571	354272	17514	70854
	2005 -2009	420	41853	161047	8371	32209
Jumlah		5810	2115309	7851171	20340	75492

Sumber: <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html.8,352,ptrans>

Selepas itu, pada era otonomi daerah, atas dua periode lima tahunan (2000-2004 dan 2005-2009), peletakan transmigran yang secara terus menerus menunjukkan penurunan. Dari aspek non-demografis, kinerja transmigrasi terlihat baik dalam hal peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja, maupun pembangunan

daerah. Dengan kondisi tujuan peningkatan kesejahteraan, Najiyati dkk (2006) mendapatkan transmigran pada UPT yang telah menjadi sentra produksi pangan telah mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 3000 kg setara beras/KK/tahun. Dari sisi penciptaan kesempatan kerja, penelitian Departemen Transmigrasi (2004) menemukan selama 1994/1995 sampai dengan 2000 telah tercipta kesempatan kerja sebanyak 30.575 orang pada 108 UPT pola tanaman pangan dan perkebunan, yang terdiri dari kesempatan kerja sebagai transmigran 25.903 orang, kesempatan kerja pada usaha pokok 1.868 orang dan kesempatan pada sektor perdagangan, jasa dan industri 2.804 orang.

Pada segi pembangunan daerah, beragam kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang berperan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, bahkan pemerintahan. Najiyati dkk, (2006) dari penelitiannya terhadap 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi menemukan bahwa sebanyak 520 unit atau 37% mampu menjadi sentra produksi pangan sedangkan yang lainnya berkembang menjadi sentra produksi komoditas lain terutama tanaman perkebunan. Program transmigrasi telah ikut menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan perdesaan baru. Dari sekitar 3000-an UPT dengan berbagai infrastruktur, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009). Desa-desa baru eks lokasi transmigrasi tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi kecamatan dan bahkan meningkat menjadi kota kabupaten/kodya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan. Berdasarkan data Pusdatintrans dan P4Trans, pada Tahun 2010 posisi Bulan November, data eks UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 97 kabupaten.

Di daerah asal, kontribusi pembangunan transmigrasi juga cukup dirasakan. Selain telah menampung jutaan orang yang menghadapi persoalan akibat keterbatasan peluang kerja dan berusaha, program ini telah mendukung suksesnya pembangunan beberapa infrastruktur strategis seperti Waduk Raksasa Gajah Mungkur di Wonogiri dan Waduk Mrica di Jawa Tengah, Waduk Saguling di Jawa Barat, dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Banten. Realitas-realitas tersebut menunjukkan, transmigrasi dalam kurun waktu cukup lama diakui sebagai salah satu program “unggulan”. Transmigrasi juga merupakan contoh yang “khas” dan merupakan strategi pengembangan wilayah yang secara “original” dikembangkan di Indonesia. Oleh karenanya, pengalaman pelaksanaan transmigrasi di Indonesia dapat menjadi sumber pembelajaran yang tak ternilai dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya wilayah yang terintegrasi dengan penataan persebaran penduduk.

Tabel 2.2 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan dan Sasaran	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Junaidi, skripsi, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2012.	Perkembangan Desa – desa Eks Transmigrasi dan Interaksi Dengan Wilayah Sekitarnya Serta Kebijakan Kedepan. (Kajian di Provinsi Jambi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pengukuran dan menganalisis stadia perkembangan desa – desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi. 2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan desa – desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi. 3. Menganalisis kondisi sosial ekonomi penduduk di desa – desa eks transmigrasi di Provinsi Jambi. 4. Menganalisis keterkaitan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • data karakteristik wilayah yang meliputi data geografi, potensi dan kesesuaian lahan pertanian, demografi, ekonomi, sosial dan budaya, dan aksesibilitas wilayah. • Data ketransmigrasi, pada tingkat kabupaten dan provinsi yang mencakup lokasi transmigrasi, perkembangan jumlah peserta transmigrasi berdasarkan daerah asal dan tahun penempatan, dan jenis konoditas tanaman yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian normalitas data. • Pemilihan surrogate variable. • Penyeragaman dimensi. • Pembobotan dan agregasi. • Klasterisasi desa. • Analisis diskriminan stadia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan desa-desa eks transmigrasi dapat di tentukan berdasarkan kesejahteraan penduduk, aktifitas non-pertanian dan aktifitas pertanian. Ketiga indikator tersebut pada dasarnya tidak hanya bermanfaat untuk desa-desa eks transmigrasi, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan tahapan perkembangan desa secara umum. 2. Perkembangan desa-desa eks transmigrasi ini ditentukan oleh jarak lokasi permukiman terhadap pusat-pusat kegiatan, sarana prasarana (terutama sarana jalan). Komoditats utama transmigrasi, karakteristik transmigran (dari proses seleksi transmigran), lamanya penempatan transmigran, serta faktor-faktor kinerja makro wilayah kabupaten. 3. Pada tingkat individu/keluarga pencapaian kesejahteraan yang lebih baik pada transmigran dipengaruhi oleh budaya etos kerja, pendidikan, beban tanggungan keluarga dan kemampuan mempertahankan kepemilikan lahan. Etos kerja lebih tinggi pada transmigran asal Jawa menyebabkan mereka lebih sejahtera dibandingkan transmigran lokal (asal Jambi). 4. Hasil penelitian menemukan rendahnya interaksi desa-desa eks transmigrasi dengan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan dan Sasaran	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil
			faktor – faktor yang mempengaruhi keterkaitan desa – desa eks transmigrasi terhadap wilayah sekitarnya di Provinsi Jambi.	dikembangkan di daerah transmigrasi		desa non transmigrasi. Rendahnya interaksi ini disebabkan tidak terbangunnya fasilitas dan tidak tumbuhnya aktifitas produksi di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional (dalam bentuk <i>supply-demand</i>) dengan desa-desa transmigrasi.
2	Indah setyorini – jurnal Mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNTAN, 2018	Peran Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi terkini transmigrasi dan kondisi penggunaan lahan di Desa Rasau Jaya 1. 2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan wilayah di Desa Rasau Jaya 1. 3. Merekomendasikan solusi kedepan dalam pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial penduduk • Sumber daya • Pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan dan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif • Analisis SWOT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar perekonomian wilayah di desa tersebut di hasilkan oleh produktifitas pertaniannya yang mempunyai komoditas unggulan berupa jagung. Namun bukan hanya itu transmigrasi juga mampu membangun dan memperbaiki sosial ekonomi penduduk setempat terutama pada tingkat pendidikan yang tinggi. 2. Faktor pendukung yang ada dari potensi sumber daya lokal dan alamnya tersebut dapat membuat pertumbuhan ekonomi desa semakin meningkat selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan desa yang berdampak terhadap perkembangan desa Rasau Jaya 1. 3. Jadi, solusi pengembangan wilayah di Desa Rasau Jaya 1 ialah difokuskan pada sektor pertanian dan peningkatan mutu sarana prasarana peningkatan SDM.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan dan Sasaran	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil
			wilayah di Desa Rasau Jaya1.			
3	Edward M Bergman – Edward Feser, 16 August 2017	Pengembangan ekonomi regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh / mempertahankan investmen langsung di industri regional. 2. Mengelompokkan ekonomi regional. 3. Restrukturisasi basis industri regional 4. Menstabilkan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • literatur yang kaya dengan studi kasus; menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang lokal. • ekonomi daerah; dan memahami implementasi itu — bagaimana regional. • perencanaan pembangunan — 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pengembangan yang umum untuk dipraktikkan di negara maju, meliputi jurusan • Area topik yang biasa digunakan dalam kursus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan penggunaan Google NGram. 2. (Satu) kelemahan adalah pandangan volume bahwa perencanaan pembangunan daerah terutama adalah dan seharusnya nasional Mereka memandang daerah perencanaan sebagai area di mana fungsi sosial ekonomi dilaksanakan. Walaupun ini merupakan pertimbangan penting, mereka tidak cukup memperhatikan unit pemerintah yang memiliki kekuatan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengoperasikan program regional”(Hirsch, 1965, p. 1207). 3. Ini tidak boleh disamakan dengan model

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan dan Sasaran	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil
			5.Mempertahankan ekonomi regional.	masalah.	pengembangan ekonomi regional (RED).	<p>tradisional "iklim bisnis yang baik" dari pengembangan ekonomi, di mana daerah dengan CBE miskin secara aktif merekrut investor terutama yang tertarik pada keringanan pajak, pekerja non-serikat pekerja dan beberapa peraturan lingkungan atau tempat kerja (LeRoy, 2005).</p> <p>4.Berbeda dengan pengusaha peluang, pengusaha "kebutuhan" adalah mantan pekerja yang masih lebih suka pekerjaan yang dibayar, tetapi telah menerima wirausaha sebagai syarat afiliasi penghasil pendapatan, misalnya hubungan kontraktor, atau telah meluncurkan wiraswasta baru. perusahaan setelah kehilangan pekerjaan yang dibayar.</p> <p>5.American National Business Incubation Association mendefinisikan inkubator bisnis sebagai "alat pengembangan ekonomi yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan wirausaha melalui serangkaian sumber daya dan layanan pendukung bisnis."</p>
4	Yusup dan Sri Rum Giyarsih – UGM jurnal	Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga	Bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesejahteraan • Perkembangan tingkat kesejahteraan warga transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Data kualitatif • Badan Pusat Statistik (BPS) • kuesioner 	<p>1.Warga transmigrasi sudah dapat bertahan hidup dan menuju kehidupan yang lebih layak dengan bekerja sebagai buruh serabutan dan petani dengan bibit yang diberikan pemerintah walaupun kondisi mereka masih berada pada garis kemiskinan.</p> <p>2.Kebutuhan akan pekerjaan penghidupan yang</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan dan Sasaran	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil
		Transmigrasi di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu				layak. Dengan adanya pemberdayaan terhadap warga, khususnya dalam bidang pertanian dengan pengelolaan bahan makanan.dengan pekerjaan sebagai petani, warga sudah dapat bertahan untuk melangsungkan kehidupan.

Sumber : Hasil Analisis, 2019



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif, pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, (Sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada metode penelitian kualitatif fokus masalah penelitian melakukan pengkajian secara sistematis, mendalam dan bermakna, (Kriyantono, 2006). Jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data – data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi yang dilakukan dengan sengaja. Dalam penentuan lokasi penelitian (Moleng, 2012) menyatakan cara yang terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan langkah teori substantif dan menjejaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, semacam keterlibatan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan bahan pertimbangan

dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Kelurahan Labuhan Tangga Baru merupakan tempat para transmigrasi tinggal dan menetap pada tahun 1998.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama satu tahun satu bulan, seminar proposal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari tahun 2020 setelah seminar proposal, selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder, pengolahan, analisis dan penyusunan laporan hasil penelitian hingga seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden pilihan (Sugiyono, 2009). Data skunder merupakan data pendukung dari data pimer yang diperoleh dari studi literatur yang terkait seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

3.3.1 Sumber Data

Mengenai data yang konsentrasikan yaitu : jurnal, artikel – artikel dan sebagainya yang berkenaan dengan studi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Untuk data instansi pemerintahan yang terkait yaitu : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan

Hilir, Kantor Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Kuesioner

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data berupa kuisisioner ini akan digunakan untuk menghimpun data primer khususnya untuk mengetahui perkembangan wilayah di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dari segi ekonomi sosial dan budaya, baik itu pertanyaan yang menyangkut tentang asal usul transmigran, berapa penghasilan perbulan yang diperoleh transmigran, apa saja pelayanan pemerintah yang sudah didapatkan oleh masyarakat transmigran di Kepenghuluan tersebut dan apa saja kemajuan yang ada di Kepenghuluan tersebut. Adapun data informan serta kriteria informan, yang Penulis ajukan dalam penulisan, sebagai berikut:

a. Kriteria Informan

Kriteria informan yang ditentukan oleh penulis adalah:

1. Informan merupakan bagian dari para transmigran dan warga asli daerah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.
2. Informan memiliki informasi yang cukup guna melengkapi data temuan penulis.

b. Profil Informan.

Subyek yang akan dijadikan informan utama dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Kepala Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.
2. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan akan menjadi cara pengumpulan data yang baik apabila (a) mengabdikan kepada tujuan penelitian; (b) direncanakan secara sistematis; (c) dicatat dan dihubungkan dengan proporsi – proporsi yang umum; (d) dapat dicek dan dikontrol validitas, realibilitas, dan ketelitiannya, Utama (2012).

3.4 Populasi dan Teknik Sampling

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, populasi dibatasi sebagai jumlah kelompok atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para

ahli. Untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin (Ridwan, 2005).

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Total Populasi
- e = Batas Toleransi Error

3.4.3 Teknik Sampling

Sampel atau contoh merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam sebuah penelitian yang kemudian hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang telah diteliti atau diamati. Menurut (Sugiyono, 2008) sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Apabila populasi tersebut besar sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan dihadapi di antaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai pengaruh transmigrasi, akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada responden yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Labuhan Tangga Baru. Teknik sampling *Probability* sampling, pada penelitian digunakan

probability sampling karena teknik pengambilan sampling Probability Sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sample dimana seluruh elemen memiliki peluang untuk terpilih menjadi sample. Dengan memakai teknik ini, itu berarti tidak ada kendala apapun untuk melakukan penelitian terhadap probabilitas atau kemungkinan dari elemen manapun apabila terpilih sebagai sample.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Tahun 2017

No	Desa/Kepenghuluan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah Keluarga	Rata – rata Jiwa Per Rumah Tangga
1.	Labuhan Tangga Kecil	2.244	629	4
2.	Labuhan Tangga Besar	2.974	841	4
3.	Bagan Punak	6.843	1.647	4
4.	Bagan Hulu	11.973	2.705	4
5.	Bagan Timur	9.024	2.347	4
6.	Bagan Kota	5.359	1.120	5
7.	Bagan Barat	13.700	3.125	4
8.	Bagan Jawa	6.445	1.449	4
9.	Parit Aman	3.738	1.095	3
10.	Labuhan Tangga Baru	2.171	500	4
11.	Bagan Punak Pesisir	3.587	995	4
12.	Bagan Jawa Pesisir	2.836	682	4
13.	Bagan Punak Meranti	2.581	577	4
14.	Serusa	2.474	641	4
15.	Labuhan Tangga Hilir	2.573	668	4
	Jumlah	78.522	19.021	4

Sumber : Kecamatan Bangko Dalam Angka (2018)

Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebanyak 500 KK, Untuk menghemat waktu dan biaya.peneliti tersebut kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan sampel berdasarkan rumus slovin, batas toleransi kesalahan yang ditetapkan adalah 10%. Di bawah ini adalah cara penyelesaiannya :

Rumus slovin :

$$\begin{aligned}n &= N / (1 + N.e^2) \\n &= 500 / (1 + 500.(10\%)^2) \\n &= 500 / (1 + 500.(0,1)^2) \\n &= 500 / (1 + 500.(0,01) \\n &= 500 / (1 + 5) \\n &= 500 / 6 \\n &= 83,33 = \text{dibulatkan menjadi } 83 \text{ KK}\end{aligned}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Deskriptif kualitatif adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan dan menafsirkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif tanpa ada hitungannya. Jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

3.6 Variabel Penelitian

Menurut Wirartha, variabel sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti (Wirartha, 2006).Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teori dan ditegaskan oleh hipotesis

penelitian. Lebih lanjut dikatakan variabel dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi empat klasifikasi, yaitu : variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval dan variabel rasio. Menurut (Sugiyono, 2009), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut ini merupakan tabel variabel penelitian :



Tabel 3.2 Variabel Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator	Metode
1. Teridentifikasi pengaruh transmigrasi terhadap masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.	• Perkembangan ekonomi masyarakat.	• Pendapatan • Indeks kualitas hidup	• Analisis deskriptif kualitatif (kuesioner)
	• Budaya lokal dengan budaya yang dibawa transmigrasi.	• Jenis kebudayaan lokal • Jenis kebudayaan dari luar	
	• Asimilasi.	• Peran serta masyarakat lokal • Peran serta masyarakat transmigrasi	
	• Tingkat kesejahteraan.	• Keamanan • Kemandirian • Kepemilikan asset	
2. Teridentifikasi pengaruh transmigrasi dalam wilayah perkembangan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.	• Pemanfaatan lahan kosong	• Penggunaan lahan sesudah dan sebelum transmigrasi	• Analisis deskriptif kualitatif (kuesioner)
	• Produksi dibidang pertanian	• Jenis produksi dibidang pertanian	
	• Pemerataan penduduk	Peran serta masyarakat local	
	• Jumlah pengangguran yang berada diwilayah peneliti	• Tingkat pengangguran	

Sumber : Hasil Analisis, (2019)

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kepenghuluan Labuhan Tangga baru

Labuhan Tangga Baru merupakan Kepenghuluan yang termasuk dalam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko tersebut merupakan ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Bagansiapiapi. Kecamatan Bangko merupakan salah satu Kecamatan yang ikut serta dalam pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Bersama dengan Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Rimba Melintang dan Bagan Simenbah. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1999 menetapkan kabupaten baru tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibu kota sementara di Bagansiapiapi.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan maka Bupati Rokan Hilir menunjuk Pak Sudarmawan sebagai PLT Penghulu sampai tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 dilakukan pemilihan penghulu yang waktu itu diikuti Pak Sudarmawan dan Pak Nasib. Secara demokrasi Pak Sudarmawan terpilih menjadi Penghulu definitive dan dilantik menjadi Penghulu Labuhan Tangga Baru dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2011 sampai tahun 2017.

Dari mula kepemimpinan Bapak Sudarmawan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sampai sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan setelah berakhirnya masa jabatan selama enam tahun maka jabatan Penghulu Labuhan Tangga Baru dilanjutkan oleh Bapak Sumardi yang dilantik oleh Camat Bangko yang ketika itu dijabat oleh Bapak H. Julianda, S.Sos sebagai PJS Penghulu Labuhan Tangga baru untuk mengisi kekosongan pemerintahan juga bertujuan untuk

mempersiapkan pemilihan Penghulu serentak sekabupaten Rokan Hilir. Bapak Sumardi dilantik pada Bulan Maret Tahun 2017 dan berakhir jabatannya pada Bulan Januari Tahun 2018.

Pada Bulan Juli BPKep Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru membentuk panitia pemilihan penghulu tahap dua, pemilihan penghulu tahap dua ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember Tahun 2017, dengan calon penghulu sebanyak dua orang yaitu Bapak Sudarmawan dan Bapak Sudarwin, pemilihan penghulu tahap dua ini masyarakat tetap kembali memberikan kepercayaan kepada Bapak Sudarmawan dan kembali terpilih lagi dan resmi dilantik oleh bapak Bupati Rokan Hilir sebagai Penghulu Labuhan Tangga Baru pada Tanggal 26 Januari Tahun 2018 digedung serbaguna Bagansiapiapi, hingga saat ini Datuk penghulu Labuhan Tangga Baru dijabat oleh Bapak Sudarmawan.

Berikut digambarkan peristiwa – peristiwa di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Yaitu :

Tabel 4.1 Peristiwa Baik dan Buruk Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
2011	Pada Bulan Februari Tahun 2011 Diadakan Pemilihan Penghulu Untuk Pertama Kalinya	-
2011	Pada Bulan Februari Tahun 2011 Penghulu depenitif yang di jabat oleh Bapak Sudarmawan dilantik	-
2012	Penghargaan Desa Terbaik Serohil	-

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Tahun 2018-2023.

4.2 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru adalah salah satu kepenghuluan yang berada diwilayah Kecamatan Bangko, yang awal mula kawasan binaan pemerintah

pusat lewat program transmigrasi yang masuk dalam wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kepenghuluan ini terbentuk pada tahun 2000 dimana langsung ditunjuk pelaksanaan tugas oleh Bupati. Adapun batas – batas Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru yang disepakati adalah sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- Sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- Sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil

Kecamatan Bangko terdiri dari 15 Desa/Kepenghuluan, dengan luas 475,26 Km². Luas wilayah perdesa/Kepenghuluan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Bangko Menurut Desa/Kepenghuluan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase (%)
1	Labuhan tangga Kecil	25.00	5.26
2	Labuhan Tangga Besar	36.00	7.57
3	Bagan Punak	45.00	9.47
4	Bagan Hulu	60.00	12.62
5	Bagan Timur	45.00	9.47
6	Bagan Kota	1.50	0.32
7	Bagan Barat	12.00	2.52
8	Bagan Jawa	16.00	3.37
9	Parit Aman	65.00	13.68
10	Labuhan Tangga Baru	9.60	2.02
11	Bagan Punak pesisir	28.00	5.89
12	Bagan Jawa Pesisir	8.00	1.68
13	Bagan Punak Meranti	36.00	7.57
14	Serusa	58.00	12.20
15	Labuhan Tangga Hilir	30.16	6.35
	Jumlah	775.26	100

Sumber: Kecamatan Bangko Dalam Angka 2018



PETA ADMINISTRASI KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA BARU

4.3 Kependudukan Kecamatan Bangko

Kependudukan di Kecamatan Bangko sama halnya dengan kota – kota lainnya di Indonesia yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali oleh berbagai faktor seperti tingginya tingkat fertlisasi penduduk dan banyaknya kaum *urban* yang datang tiap tahun. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di tahun 2016 sebanyak 76.317 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 78.522 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bangko pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Berikut ditunjukkan pada Tabel 4.3 Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Labuhan tangga Kecil	25.00	2.244
2	Labuhan Tangga Besar	36.00	2.974
3	Bagan Punak	45.00	6.843
4	Bagan Hulu	60.00	11.973
5	Bagan Timur	45.00	9.024
6	Bagan Kota	1.50	5.359
7	Bagan Barat	12.00	13.700
8	Bagan Jawa	16.00	6.445
9	Parit Aman	65.00	3.738
10	Labuhan Tangga Baru	9.60	2.171
11	Bagan Punak pesisir	28.00	3.587
12	Bagan Jawa Pesisir	8.00	2.836
13	Bagan Punak Meranti	36.00	2.581
14	Serusa	58.00	2.474
15	Labuhan Tangga Hilir	30.16	2.573
	Jumlah	775.26	78.522

Sumber : Kecamatan Bangko Dalam Angka 2018

4.4 Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Transmigrasi di Indonesia telah terjadi sejak zaman kolonial dan orde baru hingga saat ini. Beserta dasar belakang tujuan khusus seperti ingin mengembalikan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi dan mendapatkan pekerjaan hingga upah yang tinggi. Di lain pihak transmigrasi juga ditujukan untuk mengurangi kepadatan penduduk didaerah – daerah tertentu, untuk memberi keleluasaan bagi usaha – usaha pembangunan dan rehabilitasi di daerah bersangkutan. Di lain pihak lagi transmigrasi diharapkan dapat membantu dan merangsang peningkatan pembangunan di daerah – daerah yang di daerah relatif masih terbelakang. Selain itu program transmigrasi juga mempunyai peran besar dalam pengembangan dan pembangunan wilayah tempat transmigrasi ditempatkan. Dengan adanya transmigran ini maka segala potensi yang ada dilokasi transmigran tersebut akan dimanfaatkan melalui kegiatan usaha tani yang mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada masa pemerintahan orde baru, program transmigrasi menunjukkan peningkatan besar – besaran. Berikut adalah jumlah kepala keluarga dan daerah para transmigran yang datang dari pulau jawa :

Tabel 4.4 Daftar penempatan UPT III Rokan N8 Kecamatan Bangko

No	Tanggal Pendaftaran	Daerah Asal	jumlah		Jumlah	
			KK	Jiwa	Laki - Laki	Perempuan
1	4 Juli 1998	Jawa Timur	40	135	59	76
2	5 Juli 1998	DKI	40	142	68	74
3	6 Juli 1998	Jawa Timur	21	87	43	44
4	7 Juli 1998	Jawa Tengah	41	150	81	69
5	17 Juli 1998	Jawa Barat	32	129	65	64
6	21 Juli 1998	Jawa Tengah	27	95	55	40
7	17 Agustus 1998	APPDT	50	266	136	130
Jumlah			250	1004	507	497

Sumber : Rencana Pembangunan jangka menengah Labuhan Tangga Baru (2018-2023)

Mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Dengan seiring waktu program transmigrasi telah memberikan dampak perubahan pada wilayah tujuan, sebagai pusat pertumbuhan baru, dan mengembangkan peran wilayah sebagai pusat produksi dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan, bahkan pemerintahan. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru memiliki potensi dibidang pengembangan sektor perkebunan kelapa sawitnya.

Potensi disektor kelapa sawit tersebut dapat mendorong dan memiliki peran besar dalam mendorong perkembangan ekonomi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tersebut. Namun tidak hanya dari segi perkebunannya yang terdapat pula peternakan yang berkembang dan ikut serta dalam meningkatkan produktifitas ekonomi wilayah desa tersebut sudah mengantarkan desa tersebut menjadi desa yang mandiri serta berpengaruh dalam mendorong pembangunan wilayah di desa tersebut. Tidak hanya penduduk transmigrasi yang ikut berperan namun penduduk asli desa juga ikut berperan dan berpengaruh dalam pengembangan wilayah desa karna penduduk asli mayoritas pekerjaan juga sebagai petani sehingga dapat memberdayakan transmigrasi dalam mengembangkan wilayah desa. Dengan demikian perlu adanya penelitian yang mengkaji peran penduduk transmigrasi dalam pengembangn wilayah yang berada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru serta mengetahui kondisi terkini tentang penduduk transmigrasi kemudian memberikan solusi pengembangan wilayah yang akan datang. Berikut adalah tabel kelompok tani yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru :

Tabel 4.5 Daftar Kelompok Tani UPT III Rokan Kepenghuluan Labuhan Tangga baru, Kecamatan Bangko

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Jumlah		
				PKR	Lu I	Lu II
1	Karya Mukti	Iman	18	9 Ha		18
2	Usaha Tani	Parlan	20	10 Ha		20
3	Karya Jaya	Margiono	24	12 Ha		24
4	Suka Jadi	Masrun	19	95 Ha		19
5	Karya Bhakti		22	11 Ha		22
6	Mekar Sari	Saefudin	24	12 Ha		24
7	Karya Mulya	Muntolip	30	15 Ha		30
8	Sumber Rezeki	Edi Slamet	32	16 Ha		32
9	Sumber Makmur	Legiran	31	155 Ha		31
10	Sido Mulyo	Turahmin	30	15 Ha		30
Total				125 Ha	125	250

Sumber : Rencana Pembangunan jangka menengah Labuhan Tangga Baru (2018-2023)

4.5 Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

4.5.1 Pembagian Wilayah Kepenghuluan

Kepenghuluan labuhan tangga baru terbagi ke dalam 2 dusun terdiri dari :

1. Dusun suka tani : berjumlah 2 RW dan 7 RT
2. Dusun Sendang Makmur : berjumlah 2 RW dan 4 RT

4.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan

- a. Lembaga pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Jumlah

Aparatur Kepenghuluan

1. Penghulu : 1 orang

2. Sekertaris Desa : 1 orang
3. Kaur : 3 orang
4. Kasi : 3 orang
5. Staff : 5 orang

b. Badan pemusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

1. Jumlah anggota BPKep : 7 orang

c. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM : 1 Lembaga
2. Lembaga Adat : 1 Lembaga
3. PKK : 1 Lembaga
4. Posyandu : 1 Kelompok
5. Pengajian : 10 Kelompok
6. Rebana : 3 Kelompok
7. Kelompok Tani : 10 Kelompok
8. Karang Taruna : 1 Kelompok

4.6 Susunan Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko

Nama – nama perangkat kepenghuluan :

Penghulu	: Sudarmawan
Sekertaris Desa	: Yunita Afrianty
Kepala Seksi Pemerintahan	: Reski Novayani
Kepala Seksi Kesra	: Fitri Susanti
Kepala Seksi Pelayanan	: Misbahudin
Kepala Urusan TU dan Umum	: Heri Setiawan
Kepala Urusan Perencanaan	: Dwi Prasetyo
Kepala Urusan Keuangan	: Amirul Mukminin

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Masyarakat

Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat transmigrasi yang terdapat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Masyarakat dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dari populasi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 500 kepala keluarga dan sampel yang diambil penelitian sebanyak 83 kepala keluarga. Beberapa karakteristik dari responden antara lain :

5.1.1 Kelompok Umur

Struktur umur penduduk penting untuk diketahui karena struktur umur penduduk dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan mengetahui struktur umur, kita dapat mengetahui penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja. Struktur umur penduduk lokal dan transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Komposisi masyarakat berdasarkan umur, secara umum berkisar dari 18 tahun sampai dengan 60 tahun seperti tertera pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Rentang Usia Masyarakat

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	18 – 31 Tahun	43	52 %
2	33 - 46 Tahun	33	40 %
3	47 – 60 Tahun	7	8 %
Total		83	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Karakteristik umur responden berdasarkan umur diperoleh rata-rata sekitar 18-31 tahun dengan presentasi 52%. Begitupun pada penduduk dengan rata-rata umur sekitar 33-46 tahun dengan presentase 40%, dan pada penduduk dengan rata-rata umur sekitar 47-60 tahun dengan persentase 8%.

Data diatas menunjukkan bahwa dari 83 responden yang terdiri dari 43 orang berada pada tingkat usia aktif, dimana pada usia tersebut sangat diharapkan sekali bahwa jawaban atau penilaian yang diberikan responden pada koesioner yang diberikan penulis benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi atau sementara berlangsung selama ini mengenai pengaruh transmigrasi dalam pengembangan wilayah di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

5.1.2 Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan merupakan salah satu indikator aktivitas dalam menunjang keberhasilan kehidupan. Dengan pekerjaan masyarakat lokal dan transmigran dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru masyarakat lokal dan transmigran didominasi memiliki mata pencaharian sebagai petani dimana tanah atau kebun miliknya merupakan pemenuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Berikut ini tabel hasil responden pekerjaan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.2 Pekerjaan Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	53	64 %
2	Pedagang	19	23 %
3	PNS	2	2 %
4	Lainnya	9	11 %
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.2, diperoleh data masyarakat berdasarkan pekerjaan utama yaitu yang lainnya sebanyak 9 orang atau 11%, petani dan berkebun sebanyak 53 orang atau 64%, pedagang sebanyak 19 orang atau 23% dan pegawai negeri sebanyak 2 orang atau 2%. Berdasarkan hasil yang didapatkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata 53 responden memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Dari hasil pengamatan peneliti saat observasi, kebanyakan responden mengatakan dominan pekerjaannya adalah petani/berkebun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sawah atau kebun yang digarap rata-rata merupakan bantuan dari pemerintah dan ada juga yang milik sendiri. Hal ini dikarenakan responden mengolah lahan pembagian transmigrasi dari pemerintah, didukung oleh kondisi tanah gambut dan berpasir menyebabkan responden memanfaatkan untuk ditanami kelapa sawit dan pohon karet. Kepala keluarga yang pekerjaannya berdagang disebabkan karena luas lahan yang dimiliki sempit (hal ini disebabkan sebagian luas lahan diberikan kepada anaknya) sehingga pendapatannya rendah.

5.1.3 Asal Masyarakat

Penduduk yang berada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru ada yang merupakan warga lokal dan ada yang merupakan warga transmigran. Berikut ini hasil dari jawaban masyarakat terkait asal responden.

Tabel 5.3 Asal Responden

Asal Responden		Frequency	Percent
Valid	Transmigrasi	55	66,3 %
	Non transmigrasi	28	33,7 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari hasil jawaban responden didapatkan bahwa sebanyak 66,3 % dari masyarakat merupakan transmigran yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa, dan sebanyak 33,7 % merupakan penduduk lokal atau non transmigrasi. Penduduk transmigran merupakan masyarakat yang mendapat program dari pemerintah untuk pemerataan penduduk, dan mereka mendapat lahan atau tempat tinggal di daerah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

5.2 Analisis Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pendapatan yang diterima warga transmigrasi lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum mereka menjadi warga transmigrasi dan masih berada di tempat asal mereka. Pendapatan yang lebih tinggi ini juga disebabkan oleh lamanya hari kerja mereka yang ditunjang oleh banyaknya lahan pekerjaan. Warga sekitar lokasi transmigrasi yang merupakan pemilik kebun membutuhkan tenaga para warga transmigran untuk pemeliharaan dan perawatan kebun mereka.

5.3 Analisis Penghasilan Masyarakat

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan yang diperoleh keluarga transmigran maupun lokal selama satu bulan yang berupa pendapatan bersih yang dinyatakan dalam jumlah uang atau barang dari hasil mata pencaharian. Pendapatan ini dinilai dengan satuan rupiah. Pendapatan kepala keluarga transmigran yang bekerja sebagai petani bersumber dari hasil pertanian lahan yang dimiliki kepala keluarga, maka tentu saja jumlah lahan pertanian yang dimiliki akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh sesuai dengan luas atau sempitnya lahan yang dimiliki. Karena luas lahan garapan kepala keluarga transmigrasi bervariasi sehingga berbeda-beda pula hasil yang didapat. Berikut ini hasil rekap jawaban responden terkait pendapatan masyarakat.

Tabel 5.4 Pendapatan Masyarakat Lokal dan Transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tingkat Pendapatan		Frequency	Percent
Valid	<2.937.000	40	48,2 %
	>2.937.000	43	51,8 %
Total		83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari data penghasilan masyarakat diatas dapat dilihat bahwa pada penduduk lokal di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.sebanyak 51,8 % masyarakat mempunyai penghasil paling tinggi besar dari 2.937.000/bulan , dan 48,2 % masyarakat memiliki penghasilan dibawah 2.937.000/bulan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penghasilan masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru baik lokal maupun transmigran besar dari 2.937.000/bulan,atau lebih diatas rata-rata upah minimum regional untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Dengan penghasilan yang kecil responden harus lebih bisa memanfaatkan maksimal pendapatannya agar untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimumnya dapat terpenuhi. Berikut ini detail penghasilan masyarakat di kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.5 Penghasilan Masyarakat Lokal dan Transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tenggara Baru.

No	Nama	Penghasilan	No	Nama	Penghasilan	No	Nama	penghasilan
1	Inin	4.000.000	21	Indra	2.500.000	41	Azlina	5.000.000
2	Baharuddin	5.000.000	22	Mislan	3.000.000	42	Azmidar	3.000.000
3	Darmawan	5.000.000	23	Sutrisno	3.500.000	43	Yusnita	2.500.000
4	Endang	2.700.000	24	Ade	2.500.000	44	Rusli	2.500.000
5	Suwedi	2.500.000	25	Dwi Prasetyo	2.700.000	45	Yusnizar	2.500.000
6	Heri	2.700.000	26	Ayu Kartika	3.000.000	46	Mursalin	4.000.000
7	Susilo	5.000.000	27	Iman	4.000.000	47	Abd Zaini	5.000.000
8	Eko	4.000.000	28	Mayan	3.000.000	48	Halimah	2.700.000
9	Nurul	2.700.000	29	Surya	3.000.000	49	M.Tahir	2.500.000
10	Johanul	2.500.000	30	Sugimin	5.000.000	50	Awi	2.700.000
11	Agus	2.500.000	31	Ijal	2.500.000	51	Siron	5.000.000
12	Agus	5.000.000	32	Hadimin	2.500.000	52	Hariyanto	3.000.000
13	Tukiman	4.000.000	33	Junaidi	4.000.000	53	Azmidar	2.500.000

14	Umikalsum	2.700.000	34	Azuhri Akmal	2.500.000	54	Ahmad	2.500.000
15	Muhamad Amin	2.500.000	35	Azri Yanto	2.500.000	55	Ida	5.000.000
16	Samsul Selat Baru	2.500.000	36	Azwar	4.000.000	56	Rustam	3.000.000
17	Ismail	5.000.000	37	Rino	3.000.000	57	Nor Allan	2.500.000
18	Subari	3.000.000	38	Kamtiah	2.500.000	58	Hasbuloh	2.500.000
19	Fitri	2.700.000	39	Arianto	2.500.000	59	Muhammad Saleh	4.000.000
20	Budiman	2.500.000	40	Abu Salim	2.500.000	60	Resam	3.000.000
No	Nama	Penghasilan	No	Nama	Penghasilan			
61	Solihin	3.000.000	81	Rahmad Abidin	2.500.000			
62	Yusuf	3.000.000	82	Iskandar	2.500.000			
63	Riduan	3.000.000	83	Asmah	4.000.000			
64	Rosnah	2.500.000						
65	Ayob	2.500.000						
66	Misran	2.500.000						
67	Nasrin	3.000.000						
68	Yanto	5.000.000						

69	Murni	5.000.000
70	Hamzah	5.000.000
71	Atan Sani	4.000.000
72	Samsinar	2.500.000
73	Abeng	2.500.000
74	Abdullah	4.000.000
75	M.Zaidi	2.500.000
76	Sazali	2.500.000
77	Hasyim	3.000.000
78	Abdul Aziz	2.500.000
79	M.Sidik	3.000.000
80	Edi	5.000.000



5.3.1 Analisis Kepemilikan Tabungan

Memiliki tabungan merupakan keharusan bagi sebagian orang, karena banyaknya kebutuhan perlu adanya yang tang ditabung baik di bank maupun pribadi, berikut ini tabel menunjukkan kepemilikan tabungan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru :

Tabel 5.6 Kepemilikan Tabungan Masyarakat

Memiliki Tabungan		Frequency	Percent
Valid	Ada	68	81,9 %
	tidak ada	15	18,1 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.6, disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki tabungan sebanyak 68 responden (81,9%) dan yang tidak memiliki sebanyak 15 masyarakat (18,1%), sebagian besar masyarakat memiliki tabungan, karena dimasa sekarang tabungan sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, terutama untuk biaya pendidikan dan biaya sehari-hari. Masyarakat yang tidak memiliki tabungan memiliki alasan karena tidak paham penggunaan tabungan atau atm, dan sebagian mereka yang bekerja sebagai buruh yang mana pendapatan didapat dari harian, sehingga tidak ada penghasilan yang akan ditabung.

5.4 Analisis Kearifan Lokal

5.4.1 Keberadaan Budaya Lokal

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu di pelajari.

Dalam setiap daerah pasti memiliki budaya yang akan ditemui, masing-masing daerah memiliki budaya khasnya masing-masing. Di Kabupaten Rokan Hilir sendiri masih memiliki budaya yang tidak pernah hilang walau jaman sudah serba modern, salah satu budaya yang masih ada yaitu bakar tongkang yang mana budaya yang dibawa oleh penduduk cina yang menetap di Rokan Hilir, namun tidak hanya itu saja budaya yang masih ada yaitu terkait perkawinan yang menggunakan budaya melayu dan masih banyak lagi. Berikut ini hasil jawaban masyarakat terkait keberadaan Budaya lokal di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.7 Keberadaan Budaya Lokal

Budaya Lokal		Frequency	Percent
Valid	Ada	68	81,9 %
	tidak ada	15	18,1 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil rekapitan jawaban masyarakat, diketahui bahwa sebanyak 68 masyarakat (81,9%) menyatakan bahwa masih ada budaya lokal di kepenghuluan labuhan tangga baru, dan sebanyak 18,1% menyatakan sudah tidak

ada. Budaya lokal yang masih ada yaitu masih adanya adat perkawinan budaya melayu, upacara kelahiran, semah ladang, dan semah rumah. Budaya ini masih tetap ada karena besarnya pengaruh dari bersosialisasi di daerah ini.

5.4.2 Budaya Lokal Oleh Transmigran

Berikut ini tabel rekap jawaban masyarakat terkait budaya lokal yang dibawa oleh transmigran.

Tabel 5.8 Budaya Lokal Oleh Transmigran

Budaya Lokal Oleh Transmigran		Frequency	Percent
Valid	Ada	68	81,9 %
	tidak ada	15	18,1 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan dari tabel 5.8, dinyatakan bahwa sebanyak 68 masyarakat (81,9%) menyatakan bahwa ada budaya lokal yang dibawa oleh transmigran yang juga menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Karena banyaknya transmigran di kawasan tersebut dan sudah banyak keturunan sehingga tidak bisa di elakkan bahwa budaya lokal dari daerahnya dibawa ke Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Budaya yang dibawa yaitu permainan gasing dan kuda kepang yang merupakan budaya dari daerah asal mereka yaitu jawa. Keberadaan budaya lokal dari transmigran ini tidak membuat warga lokal merasa terganggu atau tidak menerima, akan tetapi warga lokal ikut memeriahkan dan menerima budaya dari daerah asal mereka.

5.5 Analisis Asimilasi

Asimilasi adalah usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama, selain itu juga asimilasi dapat dikatakan sebagai proses pembauran dua kebudayaan.

5.5.1 Peran serta Penduduk Lokal dan Transmigran terhadap Asimilasi

Dalam berukun tetangga, warga lokal dan transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tanggara Baru ikut serta dalam kegiatan baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga transmigran, karena tidak adanya merasa perbedaan diantara sesama. Berikut ini hasil rekapan jawaban masyarakat terkait peran responden terhadap asimilasi.

Tabel 5.9 Peran Masyarakat Terhadap Asimilasi

Peran Masyarakat		Frequency	Percent
Valid	Ada	49	59,0 %
	Tidak Ada	34	41,0 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Menurut tabel 5.9, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 59% masyarakat menyatakan bahwa adanya peran responden terhadap asimilasi bersama warga transmigran, kegiatan yang dilakukan yaitu seringnya mengikuti upacara adat perkawinan dan bersama-sama membantu dalam mensukseskan acara tersebut, lalu adanya kegiatan gotong royong yang mana warga lokal maupun transmigran bersama-sama membersihkan dan membangun desa mereka.

5.5.2 Gotong Royong Penduduk Lokal dan Transmigran Dalam Pembangunan Desa

Saling Membantu Kerjasama yaitu bekerja bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Pernyataan ini ingin melihat apakah responden yang dalam penelitian ini transmigran dan penduduk asli bekerjasama dalam pembangunan desa, seperti pembangunan pos keamanan, maupun pembangunan lainnya guna memajukan desanya. Tabel 5.9 menjelaskan tentang kerjasama transmigran dan penduduk asli bergotongroyong saling membantu.

Tabel 5.10 Gotong Royong Dalam Pembangunan Desa

Gotong Royong		Frequency	Percent
Valid	Sering	70	84,3 %
	Jarang	11	13,3 %
	Tidak Pernah	2	2,41 %
Total		83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 84,3% (70 orang) bahwa transmigran dan penduduk asli sering melaksanakan gotong royong saling membantu dalam pembangunan desa, semua dikerjakan bersama-sama, dan sebanyak 13.3 % atau sebanyak 11 responden menyatakan jarang melaksanakan gotong royong, karena adanya kesibukan tersendiri yang membuat mereka tidak bisa ikut dalam melaksanakan gotong royong, dan sebesar 2,41 % atau sebanyak 2 masyarakat menyatakan tidak pernah mengikuti gotong royong, karena satu dan lain hal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, penduduk asli atau lokal maupun penduduk transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru ini saling

gotong royong dan bekerjasama dalam pembangunan desa kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, sehingga tidak adanya perbedaan.

5.6 Analisis Tingkat Kesejahteraan

5.6.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, kualitas pendidikan yang lebih baik memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi nilai dan cara berfikir seseorang untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan pengembangan daerah tinggalnya. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi pendidikan terakhir responden .

Tabel 5.11 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir		Frequency	Percent
Valid	SD	5	6,0 %
	SMP	32	38,6 %
	SMA	46	55,4 %
	Sarjana	0	0 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari tabel 5.11, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 46 masyarakat atau 55,4 %, dan sebanyak 32 masyarakat atau 38,6 % hanya tamat SMP dan sebanyak 5 responden atau 6 % pendidikan terakhirnya

hingga SD. Keadaan ekonomi yang sulit, memaksa mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

5.6.2 Keluarga Yang Sudah Bekerja

Didalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila memiliki tambahan pendapatan tidak hanya dari kepala keluarga tentunya akan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berikut ini rekapitan hasil jawaban masyarakat terkait keluarga yang sudah bekerja.

Tabel 5.12 Keluarga Yang Sudah Bekerja

Keluarga Yang Bekerja		Frequency	Percent
Valid	Ada	44	53,0 %
	tidak ada	39	47,0 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Menurut tabel 5.12, sebanyak 44 masyarakat atau 53% menyatakan bahwa sudah ada keluarga yang bekerja, baik sebagai buruh, petani, maupun pekerjaan berdagang sehingga membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak hanya bergantung pada penghasilan orangtua. Anak-anak yang merupakan anak transmigran sudah dilatih oleh orangtuanya untuk bekerja keras sehingga menjadi anak-anak yang mandiri dan pekerja keras.

Sebanyak 39 masyarakat menyatakan tidak ada keluarganya yang sudah bekerja dikarenakan usia anaknya masih usia sekolah dan diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan. Para orangtua di Desa Labuhan Tangga Baru

mengutamakan pendidikan anak-anaknya agar tidak ada anak-anak mereka yang putus sekolah walaupun beberapa diantara mereka yang tidak memiliki pendapatan yang besar.

5.6.3 Kepemilikan Aset Tanah

Sebagaimana yang lihat maka warga yang mengikuti program transmigrasi lokal ini akan mendapat aset berbentuk tanah untuk di kelola menjadi perkebunan sawit seluas 1 hektar dan mendapat seperempat hektar luas lahan yang di pakai untuk rumah bersama pekarangannya yang tentunya mereka juga mendapatkan rumah dan sudah ada sebagian warga yang sudah melakukan perubahan terhadap rumah mereka baik penambahan kamar maupun bagian depan rumah seperti teras dan ruangan lainnya. Selain aset yang di dapat dari pemerintah sebagai bantuan kepada warga transmigrasi sebagian besar juga warga sudah ada yang mampu membeli barang yang berupa aset mereka. Meskipun tidak berbentuk perhiasan atau tanah di lokasi lain di luar wilayah transmigrasi namun aset yang mereka dapat beli dengan sendiri ini berupa kendaraan bermotor dan barang barang elektronik yang ada dalam rumah mereka seperti halnya: televisi, radio dan yang lainnya yang dapat mereka jual kembali jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana untuk keperluan mereka. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil masyarakat yang memiliki aset tanah.

Tabel 5.13 Kepemilikan Aset Tanah Masyarakat

Memiliki Aset Tanah		Frequency	Percent
Valid	Ada	68	81,9 %
	tidak ada	15	18,1 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.13, menyatakan bahwa sebanyak 68 masyarakat atau 81,9 % memiliki aset tanah, yang mana aset tanah ada yang berasal dari pemerintah dan ada juga yang merupakan milik sendiri. Dari 83 masyarakat, sebanyak 18,1% masyarakat tidak memiliki aset tanah. Hal tersebut dikarenakan mereka merupakan warga lokal, yang memilih tinggal di rumah sewa yang ada di daerah ini.

5.6.4 Status Kepemilikan aset Tanah

Status kepemilikan aset tanah harus memiliki legalisasi yang jelas, karena jika tidak memiliki legalisasi yang jelas akan menimbulkan ketimpangan akan kepemilikan tanah kedepannya. Berikut ini hasil jawaban masyarakat terkait status kepemilikan aset tanah responden.

Tabel 5.14 Status Kepemilikan Aset Tanah

Status Kepemilikan		Frequency	Percent
Valid	Dari Pemerintah	69	83,1 %
	Milik Sendiri	14	16,9 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.14, diketahui bahwa status kepemilikan aset tanah masyarakat sebanyak 69 masyarakat atau 83,1 % merupakan aset tanah yang dimiliki dari pemerintah dari program pemberian tanah kepada masyarakat transmigrasi. Sertipikat tanah yang diberikan oleh pemerintah telah menjadi milik pribadi penerima bantuan, sedangkan sebanyak 14 masyarakat (16,9 %) status

kepemilikan aset tanah merupakan milik sendiri yang mana sebagian merupakan warga lokal di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

5.6.5 Kepemilikan Moda Transportasi

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu keluarga dapat dilihat dari banyaknya barang berharga yang mereka miliki. Barang berharga bukan hanya barang-barang yang mahal harganya namun juga barang-barang seperti peralatan kebutuhan pokok, barang untuk kebanggaan, dan barang-barang untuk kesenangan. Barang berharga yang dimiliki kepala keluarga transmigran bermacam-macam jenisnya. Pada penelitian ini barang berharga meliputi: alat transportasi (mobil dan motor). Berikut ini rekapitan jawaban masyarakat terkait kepemilikan moda transportasi.

Tabel 5.15 Kepemilikan Moda Transportasi

Moda Transportasi		Frequency	Percent
Valid	Sepeda Motor	83	100,0 %
	Sepeda	0	0
	Mobil	0	0
	Tidak Ada Kendaraan	0	0
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Pada Tabel 5.15, dapat dijelaskan bahwa seluruh masyarakat hanya memiliki sepeda motor sebagai moda transportasi mereka. Sepeda motor sebagai alat transportasi sebagai kebutuhan yang penting bagi kepala keluarga untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan ber-pergian, ini karena untuk akses lokasi

kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berladang ataupun yang lain-lain mereka harus menempuh jarak yang jauh sehingga tidak mungkin berjalan kaki.

5.6.6 Kepemilikan Hewan Ternak

Selain aset di atas warga transmigrasi juga memiliki aset berupa hewan ternak kambing yang mereka kelola secara swadaya dengan kelompok tani mereka. Ada sebagian warga transmigrasi juga sudah memiliki ternak secara perorangan walaupun baru berupa ayam dan itik namun ternak ini sudah bisa mereka jual dan mereka jadikan uang jika terdapat kebutuhan yang mendesak akan uang. Berikut ini adalah hasil rekapitan jawaban masyarakat yang memiliki hewan ternak.

Tabel 5.16 Kepemilikan Hewan Ternak

Hewan Ternak		Frequency	Percent
Valid	Sapi	0	0
	Kambing	18	21,7
	Ayam	37	44,6
	Itik	21	25,3
	Lain-lain	7	8,4
	Total	83	100,0

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.16, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki hewan ternak, dimana dari 83 masyarakat, sebanyak 18 masyarakat atau 21.7 % memiliki ternak kambing, dan sebanyak 37 masyarakat atau 44,6 % memiliki ternak ayam, lalu 21 masyarakat atau 25,3 % masyarakat memiliki hewan ternak berupa itik, dan hewan ternak lainnya. Kepemilikan hewan ternak ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat transmigran ada yang mendapatkan ternak kambing maupun ayam atau itik dari bantuan yang diberikan

oleh pemerintah, untuk membantu kehidupan mereka dalam melakukan usaha pemenuhan hidup.

5.6.7 Analisis Sarana Keamanan di Desa

Sarana keamanan, ketertiban dan pelayanan umum adalah sarana yang memberikan pelayanan umum dan menjaga keamanan maupun ketertiban masyarakat desa. Berikut ini hasil rekapitan jawaban masyarakat terkait sarana keamanan di desa tersebut.

Tabel 5.17 Sarana Keamanan di Desa

Sarana Keamanan		Frequency	Percent
Valid	Pos Ronda	0	0
	pos kamling	83	100,0 %
	Lain-lain	0	0
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.17, Jenis sarana keamanan di Desa Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru adalah pos kamling. Secara umum kondisi sarana keamanan dan pelayanan umum di Desa Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru terbilang cukup baik. Pos kamling diadakan agar menghindari tingginya tingkat kejahatan di desa tersebut serta adanya keamanan yang menjaga, dengan diberikan kepercayaan kepada pemuda setempat yang tidak bekerja untuk menjaga pos kamling tersebut.

5.6.8 Tingkat Kejahatan di Desa

Dengan adanya sarana keamanan di desa Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tentunya warga berharap tidak tingginya tingkat kejahatan yang ada di desa tersebut. Berikut ini hasil rekap masyarakat terkait tingkat kejahatan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.18 Tingkat Kejahatan di Desa

Tingkat Kejahatan		Frequency	Percent
Valid	Sangat Sering	0	0
	Sering	0	0
	Tidak Sering	83	100,0 %
	Total	83	100,00 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.18, diketahui bahwa tidak seringnya terjadi kejahatan di lingkungan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, masih amannya lingkungan di Desa tersebut karena tidak adanya kesenjangan antara warga dan transmigran serta tingkat kemanan yang selalu dijaga oleh warga setempat.

5.6.9 Tingkat Keamanan di Desa

Kesejahteraan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan keamanan. Tingkat keamanan yang kondusif akan menjadi faktor yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial individu dan masyarakat. Hal ini juga menjadi dasar sehingga dalam pengukuran keberhasilan pembangunan desa, salah satu indikator yang digunakan aspek keamanan. Berikut ini tingkat keamanan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru menurut responden.

Tabel 5.19 Tingkat Keamanan di Desa

Tingkat Keamanan		Frequency	Percent
Valid	Aman	65	78,3 %
	cukup aman	18	21,7 %
	Tidak Aman	0	0
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari hasil masyarakat didapatkan bahwa, tingkat keamanan di Kepenghuluan labuhan Tangga Baru tergolong aman, dimana dari 83 masyarakat, 65 masyarakat atau 78,3 % diantaranya menyatakan bahwa di daerah tersebut aman, dan 18 masyarakat atau 21,7 % menyatakan cukup aman, tingkat keamanan yang tinggi diwilayah ini dapat mendukung aktifitas masyarakat dalam pembangunan wilayah tanpa merasa terganggu dengan apapun.

5.6.10 Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Pemenuhan kebutuhan pokok minimum pada penelitian ini menggunakan tolok ukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga yaitu berdasarkan ukuran beras sebagai kebutuhan dasar makanan sehari-hari yang harus dipenuhi setiap rumah tangga. Ukuran yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga menggunakan ukuran beras perkapita / tahun. Menurut Damari dalam Mulyanto (2000:30), kebutuhan pokok meliputi kebutuhan akan bahan makanan, perumahan, sandang serta barang - barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasi. Namun pada dasarnya kebutuhan yang paling diutamakan diantara yang lainnya yaitu kebutuhan akan makanan. Berikut ini hasil jawaban masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Tabel 5.20 Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Kebutuhan Rumah Tangga		Frequency	Percent
Valid	Sudah Terpenuhi	71	85,5 %
	Kurang Terpenuhi	12	14,5 %
	Tidak Terpenuhi	0	0
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari Tabel 5.20 dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tangga berdasarkan ukuran beras terhadap responden tergolong dalam tingkat sudah terpenuhi, dimana sebanyak 71 (85,5%) masyarakat menyatakan sudah terpenuhi. Dan sebanyak 12 (14,5%) masyarakat menyatakan kurang terpenuhi, karena Pendapatan yang diperoleh responden besar namun untuk indikator kesejahteraan keluarga transmigran ini banyak yang nyaris miskin, hal ini disebabkan karena jauhnya pasar sehingga pengeluarannya sedikit. Kemudian jumlah pengeluaran sehari hari dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

5.6.11 Bantuan Bahan Pangan dari Pemerintah

Bahan pangan merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, terpenuhinya bahan pangan akan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tidak semua merupakan masyarakat yang mampu, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena rendahnya pendapatan yang didapatkannya dalam sebulan atau hariannya. Berikut ini hasil rekapitan jawaban masyarakat terkait bantuan bahan pangan dari pemerintah .

Tabel 5.21 Bantuan Bahan Pangan dari Pemerintah

Bantuan Bahan Pangan		Frequency	Percent
Valid	Pernah	28	33,73 %
	Jarang	15	18,07 %
	tidak Pernah	40	48,20 %
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.21, sebanyak 33,73% masyarakat menyatakan pernah mendapatkan bantuan bahan pangan dari pemerintah, dan sebanyak 18,07% masyarakat menyatakan jarang mendapatkan bantuan bahan pangan dan sebanyak 48,20% masyarakat menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan bahan pangan dari pemerintah. Pemerintah telah memberikan lahan kepada masyarakat transmigran, dengan tujuan dapat digarapnya lahan dan menghasilkan uang untuk kebutuhan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan bahan pangan, namun untuk warga miskin yang tidak memiliki aset dan pendapatan dibawah rata-rata selalu didata oleh pemerintah daerah untuk diberikannya bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti pemberian beras,gula,minyak dan lain-lain. Responden yang tidak mendapatkan bantuan merupakan responden yang memiliki penghasilan cukup dan lebih sehingga tidak ada lagi bantuan yang harus diberikan dari pemerintah.

5.7 Analisis Penggunaan Lahan

5.7.1 Penggunaan Lahan Sebelum adanya Transmigrasi

Sebagai kawasan perdesaan transmigrasi yang mulai ditempati pada tahun 1982, kondisi penggunaan lahan pada awal periode ini sangat erat kaitannya

dengan rencana alokasi pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Dimana masing-masing kepala keluarga mendapatkan jatah lahan seluas 2 Ha yang dibagi dalam lahan pekarangan seluas 0,5 Ha. Lahan Usaha I seluas 1 Ha, dan Lahan Usaha II seluas 1 Ha. Berikut ini hasil respondenisasi terkait penggunaan lahan sebelum adanya transmigrasi.

Tabel 5.22 Penggunaan Lahan Sebelum Adanya Transmigrasi

Penggunaan Lahan		Frequency	Percent
Valid	Pertanian	33	39,8 %
	Perkebunan	0	0
	Perdagangan dan Jasa	0	0
	lain-lain	50	60,2 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.22, penggunaan lahan sebelum adanya transmigrasi yaitu merupakan kawasan pertanian atau kebun campuran serta merupakan kawasan hutan. Perkembangan penggunaan lahan pada periode ini secara keseluruhan terlihat mulai ada peningkatan yang signifikan setelah lahan-lahan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru telah selesai disiapkan dan telah dikelola oleh warga. Dampak dari penyiapan lahan-lahan untuk transmigrasi tersebut memberikan pengaruh terhadap penurunan luasan pada jenis penggunaan lahan kebun campuran, semak belukar dan kawasan hutan.

5.7.2 Penggunaan Lahan Setelah Adanya Transmigrasi

Adanya transmigrasi membuat perubahan yang signifikan terhadap lahan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, yang mana perubahan tersebut merupakan

perubahan yang signifikan dan positif karena menjadi lahan yang memberikan hasil kepada masyarakat. Berikut ini hasil respondensi penggunaan lahan setelah adanya transmigrasi.

Tabel 5.23 Penggunaan Lahan Setelah Adanya Transmigrasi

Penggunaan Lahan		Frequency	Percent
Valid	Pertanian	17	20,5 %
	Perkebunan	66	79,5 %
	Perdagangan dan Jasa	0	0
	lain-lain	0	0
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.23, diketahui bahwa penggunaan lahan menurut 66 masyarakat yaitu beralih menjadi perkebunan yaitu perkebunan sawit yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Mencermati penggunaan lahan pada Kawasan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sejak 1982 hingga 2019 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada umumnya terlihat kecenderungan penggunaan lahan yang terjadi yakni perubahan penggunaan lahan dari lahan yang kurang produktif ke lahan-lahan yang lebih produktif mengikuti tingkat kebutuhan kegiatan masyarakat. Perubahan tersebut dikarenakan adanya program transmigrasi yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga masyarakat disekitarpun ikut merasakan dengan ikut bekerja di perkebunan sawit tersebut menjadi buruh dan sebagainya.

5.8 Analisis Bidang Pertanian

Lahan pertanian adalah modal utama untuk menjamin kelangsungan hidup para kepala keluarga. Seberapa luasnya lahan pertanian yang dimiliki kepala keluarga, dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi ekonomi kepala keluarga tersebut. Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden terkait berkurangnya lahan pertanian yang dimiliki, yaitu ada satu responden yang memberikan lahan tersebut kepada anaknya. Luas lahan yang diberikan kepada anak 0,75 Ha dari 2 Ha luas lahan perkebunan sehingga sisa 1,5 Ha (0,25 luas lahan pekarangan dan 1,25 luas lahan perkebunan) untuk responden. Berikut ini rekapan hasil jawaban masyarakat terkait produksi bidang pertanian .

Tabel 5.24 Produksi Bidang Pertanian

	Jenis Produksi	Frequency	Percent
Valid	Padi Sawah	0	0
	Sawit	83	100,0 %
	Karet	0	0
	Sayuran	0	0
	Lain-lain	0	0
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari tabel 5.24, dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat memiliki produksi pertanian yaitu sawit, yang mana tanah di desa tersebut sangat cocok untuk ditanami sawit. Seperti diketahui bahwa desa Kepenghuluan labuhan Tangga Baru merupakan desa penghasil tanaman sawit, dalam hal ini sistem penjualan sawit, masyarakat transmigran pada saat itu diberi kemudahan yaitu disetiap unit desa memiliki satu pengepul sawit yang membawahi 25 orang petani sawit hal ini bertujuan agar petani tidak kesulitan untuk menjualkan sawit, perlu dijelaskan disini arti pengepul sendiri berbeda dengan aparatur pemerintahan dalam hal ini

aparatur pemerintahan disarankan untuk tidak jadi pengepul hal ini ditakutkan akan terjadinya kediktatoran seorang pemimpin .

Untuk saat ini kegiatan pengepul tanaman sawit sangatlah jarang atau bisa dibilang tidak dilakukan lagi hal ini dikarenakan masyarakat Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru mulai menjual tanaman sawit ke truk-truk yang datang ke desa dan mengambil langsung ke para petani di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru .

5.9 Analisis Pemerataan Penduduk

Tujuan pemerataan penduduk ialah Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta Terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan – kawasan lainnya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Konsep dari pemerataan penduduk ialah :

- a. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa
- b. Melakukan pelatihan terhadap masyarakat desa agar dapat mengelolah sumber daya alam yang dimiliki.

5.9.1 Tingkat Kepadatan Penduduk

Kehidupan sosial budaya masyarakat transmigrasi tidak terlepas dari perkembangan penduduk serta peranan pemerintah dalam masyarakat. Perkembangan penduduk terus bertambah hingga tahun 2020 terdata penduduk

transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru mencapai 500 KK perkembangan penduduk transmigrasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru disebabkan hasil pertanian, perkebunan dan pekerjaan yang baik sehingga para transmigran memanggil sanak saudara yang ada di daerah asalnya untuk datang mencari pekerjaan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru seperti ada yang ikut memborong bangunan rumah, ada yang membantu di bidang pertanian, ada yang sudah mampu membuat meubel sendiri. Selain itu penambahan penduduk masyarakat transmigran juga terjadi karena ada proses kawin-mawin antara masyarakat transmigrasi yang terjadi baik dengan masyarakat lokal di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, maupun ada yang kawin mawin dari desa-desa tetangga. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebagai berikut .

Tabel 5.25 Tingkat Kepadatan Penduduk

	Tingkat	Frequency	Percent
Valid	Padat	0	0
	Sedang	61	73,5 %
	jarang-jarang	22	26,5 %
	Total	83	100,0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.25, masyarakat menyatakan bahwa tingkat kepadatan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebanyak 73,5% masyarakat menyatakan berada pada tigtkatan Sedang, dan sebanyak 26,5% masyarakat menyatakan tingkat kepadatan pendudukan jarang-jarang. Program transmigrasi merupakan program yang dibuat untuk menghindari terjadinya kepadatan penduduk di Pulau Jawa, sehingga kepadatan penduduk di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tidak padat dan tergolong aman. Program ini dinyatakan berhasil karena mampu

mengurangi angka kepadatan penduduk Indonesia dan memberikan tanah serta kegiatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan hidup di wilayah transmigrasi. Dengan memindahkan dan memukimkan sebagian penduduk dari wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduk ke wilayah-wilayah pertanian dan produksi baru diharapkan berbagai permasalahan kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan keamanan yang dihadapi di kedua kelompok daerah tersebut dapat sekaligus ditangani. Dengan demikian pembangunan dibidang transmigrasi merupakan perpaduan yang serasi antara usaha pengembangan sumber daya manusia dengan usaha pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lagi pula transmigrasi merupakan salah satu usaha mempercepat proses pembauran dalam usaha memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa serta memeratakan pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

5.9.2 Pemerataan Penduduk Lokal dan Transmigrasi

Upaya pemerintah untuk pemerataan penyebaran penduduk dan mengatasi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui program transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Upaya penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia karena sebagian besar penduduk terfokus di suatu wilayah seperti kota besar atau pulau yang memiliki kesempatan kerja atau kesempatan hidup besar. Sehingga di kota atau pulau yang dianggap maju tersebut tidak terjadi kepadatan penduduk yang tinggi, maka perlu di lakukan penyebaran penduduk dengan cara transmigrasi. Selain itu, penyelenggaraan transmigrasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan

merubah nasib. Namun tidak hanya penduduk transmigrasi saja yang harus diperhatikan namun penduduk lokal juga harus diperhatikan, terutama pemerataan penduduknya. Berikut ini pemerataan penduduk di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.26 Pemerataan Penduduk Lokal dan Transmigrasi

Pemerataan Penduduk		Frequency	Percent
Valid	Sudah baik	44	53,0 %
	Belum beraturan	39	47,0 %
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil rekapitan jawaban masyarakat, dinyatakan bahwa pemerataan penduduk sudah baik. Pemerataan penduduk lokal dan transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dilihat dari tidak terjadi kepadatan dan menyebar dikawasan tersebut dan masing-masing memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi kehidupan mereka sehari-hari.

5.10 Analisis Tingkat Pengangguran

5.10.1 Tingkat Pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Masalah pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah pusat saja, akan tetapi juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Namun dilihat dari masalah yang dialami pemerintah mengenai angka pengangguran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir merupakan satu masalah klasik yang harus cepat diatasi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tingkat pengangguran menjadi menurun karena adanya program transmigrasi, sehingga masyarakat didorong untuk berusaha dan bekerja karena

pemerintah telah membekali mereka dengan diberinya lahan dan pelatihan pekerjaan agar menjadi investasi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hidup setiap harinya. Berikut ini hasil dari rekapan jawaban masyarakat terkait jumlah pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.27 Jumlah Pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Jumlah Pengangguran		Frequency	Percent
Valid	Banyak	0	0
	tidak banyak	83	100,0 %
	Tidak Ada	0	0
	Total	83	100 %

Sumber : Hasil Analisis,2020

Menurut tabel 5.27, semua responden menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru menurun, artinya tidak banyak lagi jumlah pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dan program transmigrasi dapat membantu mengurangi tingginya angka pengangguran di Indonesia.

5.10.2 Tingkat Pengangguran Setelah Program Transmigrasi

Program Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dimulai pada tahun 1980-an, Program transmigrasi menggabungkan masyarakat tranmigran yang berbeda kultur sehingga kecemburuan sosial dan konflik antara warga trans dapat diminimalisir di tempat permukiman. Penggabungan masyarakat ini tidak menimbulkan kecemburuan antara masyarakat karena mereka senasib dan diperlakukan sama dan tidak ada pembedaan dari awal masuk, selama dilokasi haknya sama dan adil. Masyarakat Transmigrasi dibina dalam Program

pembinaan dan pembangunan desa transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat transmigrasi, sehingga mereka dapat memenuhi semua kebutuhan hidup baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekurangan tenaga kerja, dan pembukaan lahan pertanian baru dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera. Berikut ini hasil jawaban masyarakat terkait tingkat pengangguran setelah adanya transmigrasi.

Tabel 5.28 Tingkat Pengangguran di Desa setelah Adanya Transmigrasi

Tingkat Pengangguran		Frequency	Percent
Valid	Menurun	83	100,0 %
	Meningkat	0	0
	Total	83	100,00 %

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.28, seluruh masyarakat menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru menurun setelah adanya transmigrasi, hal ini dikarenakan adanya lahan yang dijadikan sebagai tempat mencari nafkah, sehingga tingkat pengangguran menurun. Warga transmigrasi sudah dapat bertahan hidup dan menuju kehidupan yang lebih layak dengan bekerja sebagai buruh serabutan dan bertani dengan bibit yang diberikan pemerintah walau kondisi mereka masih berada pada garis kemiskinan. Tetapi hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya program transmigrasi, banyak keuntungan dan keberhasilan yang diraih, sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan tingkat Pengangguran yang rendah.

5.11 Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Pada awal tahun 1990 semua warga transmigrasi sudah mendapat rumah masing-masing yang terbuat dari tiang kayu bulat dengan dinding ada yang papan ada yang dinding bambu serta atap dari alang-alang dan rumbia. Dalam menyambung hidup, para transmigran berusaha mencari pekerjaan sendiri karena mereka tidak ingin hanya bergantung pada pemerintah. Mereka ada yang bekerja sebagai tukang bangunan di tempat-tempat lain, ada yang bertani menanam kacang, jagung, padi serta ada yang menanam tanaman tahunan berupa cingkeh, pala, dan kelapa yang hasilnya dapat mereka jual dan rasakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membiayai uang sekolah dari anak-anak mereka. Selain bekerja mereka juga banyak yang beternak untuk mereka jual seperti ternak kambing, ayam, sapi dan itik.

Perkembangan secara ekonomi masyarakat transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dari tahun 1990an sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dari perkembangan pembangunan rumah-rumah dari para transmigran, dan dapat dilihat dari hasil di mana para transmigran sudah ada yang dapat membuka warung-warung sendiri yang cukup besar, dan sudah ada koperasi simpan pinjam yang sudah bergerak pada usaha-usaha Kredit Usaha.

Perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat transmigran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru tidak lepas dari kebiasaan-kebiasan yang ada di desa lama mereka yang ditinggalkan di mana ada kegiatan-kegiatan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan adat yang terbentuk. Seperti rukun. Di dalam rukun ini ada perkumpulan masyarakat baik suka maupun duka yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Pola sosial yang sekarang berkembang di

wilayah Labuhan Tangga Baru adalah kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam struktur ini, budaya dan nilai-nilai tradisi masih terjaga masyarakat di wilayah desa Labuhan Tangga Baru mempunyai sifat untuk bergotong royong dan kesetiakawanan yang tinggi. Di samping masyarakat yang dikenal mempunyai kesetiaan, loyal kepada pimpinan baik di tingkat RT,RW, Desa ataupun sampai komunitas tingkat nasional, sifat dan jiwa semacam itu merupakan bagian peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Aspek pemberdayaan masyarakat (*Community Empowering*), khususnya masyarakat lokal dan para Transmigran harus menjadi prioritas dalam pengembangan sosial budaya masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat yang utama adalah mengembangkan dan mempertahankan setiap partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan. Pelaksanaan program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat terlihat dengan jelas kehidupan masyarakat yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Dan dapat pula dilihat dengan sangat kecilnya masyarakat transmigran yang kembali ke daerah asalnya. Meskipun ada beberapa orang transmigran yang kembali ke daerah asalnya dengan berbagai alasan.

Perkembangan kehidupan mereka sangat baik dari hari ke hari dan memiliki peningkatan yang drastis. Mereka sudah mempunyai sarana prasarana sendiri berupa rumah dan tanah milik sendiri, dan beberapa keluarga sudah memiliki fasilitas transportasi pribadi. Mereka merasa kehidupan antar umat beragama dan kehidupan sehari-hari merasa aman dan rukun. Mencari mata pencaharian lebih mudah dan gampang dibandingkan dengan mereka berada di kampung halamannya

sendiri. Apabila mereka kembali ke daerah asalnya mereka tidak mempunyai rumah dan mereka harus memulai kehidupan baru lagi. Hubungan mereka dengan warga desa masyarakat lokal sangat baik.

kedatangan transmigran ke Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru membuat pendapatan warga lokal menjadi meningkat, hal ini disebabkan dengan adanya beberapa program yang dijalankan transmigrasi yaitu diantaranya pengembangan kawasan transmigrasi dengan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha bantuan paket usaha warga transmigrasi, pembentukan wirausaha, pembentukan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), pemberian modal usaha berupa peternakan, Sarana Produksi Pertanian (saprotan), sehingga itu transmigrasi yang dibekali dengan ilmu sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga peluang kerja untuk masyarakat setempat lebih besar.

Program transmigrasi memang sangat menguntungkan bagi transmigran. Selain diberi lahan, transmigran juga diberi sejumlah tunjangan, seperti rumah, biaya hidup, dan biaya transportasi selain keuntungan yang di dapat oleh masyarakat transmigrasi di satu sisi masyarakat setempat yang berada di kawasan transmigrasi juga mengalami keuntungan. Dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dapat dikatakan baik melalui program transmigrasi yang di buat oleh pemerintah maka dari itu hendaknya kondisi ini dapat terus dipertahankan dan akan lebih baik jika dapat ditingkatkan oleh karena itu hendaknya pemerintah terus mengadakan program transmigrasi agar terjadi pemerataan penduduk sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Ada kebanggaan di hati mereka karena mereka merasa berhasil mengubah hidup mereka yang sekarang. yang sudah kawin campur dan sudah mempunyai anak sehingga sudah merasa Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru adalah tanah kelahiran mereka sendiri. Karena anak-anak mereka ada yang masih bersekolah baik di Sekolah dasar, hingga ada yang sudah sampai ke perguruan tinggi di Riau. Ada yang sudah memiliki usaha sendiri dan usahanya sudah berhasil hingga enggan untuk pulang.

5.12 Peran Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Masyarakat transmigrasi yang ada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebagian besar merupakan transmigran dari Pulau Jawa yang sekarang berada di Kecamatan Bangka Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 1990, masyarakat transmigran dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan perpindahan penduduk ke Desa di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Sejak periode kedatangan masyarakat transmigran sampai dengan saat ini, telah terjadi perkembangan wilayah maupun ekonomi masyarakat transmigrasi itu sendiri. Banyak dari mereka yang memiliki lahan untuk dikelola sebagai lahan pertanian dan juga untuk tempat tinggal. Keahlian yang dimiliki dalam bersawah membuat mereka bertahan dan bahkan berkembang dalam kehidupannya. Kebanyakan dari mereka sudah memiliki mata pencaharian dengan berbagai profesi yang bisa meningkatkan kehidupan ekonomi. Keadaan seperti inilah yang menjadi impian masyarakat transmigran saat kedatangan pertama mereka di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru .

Kehidupan ekonomi mereka meningkat dan terus berpengaruh terhadap jangkauan pendidikan. Jika dahulu mereka datang dengan latar pendidikan sekolah dasar dan bahkan tidak tamat, maka sekarang ini kebanyakan dari anak cucu mereka telah menikmati perkembangan pendidikan yang ada. Satu demi satu keturunan mereka menamatkan sekolah bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi. Terlepas dari itu peran transmigrasi bagi pengembangan wilayah khususnya di wilayah transmigrasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru telah menuai berbagai perubahan seperti perubahan pada sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Serta transmigrasi juga memiliki peran yang penting dalam memperbaiki perekonomian di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru . Namun masih ada yang harus dibenahi dan di tingkatkan lagi keefektifan nya. Dan program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sudah dikatakan berhasil karena telah membantu dan mendorong dalam pengembangan perekonomian di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

5.13 Hasil Rekapitulasi Penelitian

Pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan suatu wilayah, dianalisis berdasarkan variabel yang tersedia, dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan apa saja yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah setelah adanya program transmigrasi. Berikut ini, hasil rekapitan hasil penelitian terhadap masyarakat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

Tabel 5.29 Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

No.	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah	Indikator	Jumlah	Percent
1	Tingkat Pendapatan	<2.937.000	40	48,20%

No.	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah	Indikator	Jumlah	Percent
		>2.937.000	43	51,80%
2	Memiliki Tabungan	ada	68	81,90%
		tidak ada	15	18,10%
3	Budaya Lokal	ada	68	81,90%
		tidak ada	15	18,10%
4	Budaya Lokal Oleh Transmigran	ada	68	81,90%
		tidak ada	15	18,10%
5	Peran Masyarakat	Ada	49	59,00%
		Tidak Ada	34	41,00%
6	Gotong Royong	sering	70	84,30%
		jarang	11	13,30%
		Tidak Pernah	2	2,41%
7	Pendidikan Terakhir	SD	5	6,00%
		SMP	32	38,60%
		SMA	46	55,40%
		Sarjana	0	0%
8	Keluarga Yang Bekerja	ada	44	53,00%
		tidak ada	39	47,00%
9	Memiliki Aset Tanah	ada	68	81,90%
		tidak ada	15	18,10%
10	Status Kepemilikan	Dari Pemerintah	69	83,10%
		Milik Sendiri	14	16,90%
11	Moda Transportasi	Sepeda Motor	83	100,00%
		Sepeda	0	0
		Mobil	0	0
		Tidak Ada Kendaraan	0	0
12	Hewan Ternak	Sapi	0	0
		Kambing	18	21,7
		Ayam	37	44,6
		Itik	21	25,3
		Lain-lain	7	8,4
13	Sarana Keamanan	Pos Ronda	0	0
		pos kamling	83	100,00%
		Lain-lain	0	0

No.	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah	Indikator	Jumlah	Percent
14	Tingkat Kejahatan	Sangat Sering	0	0
		Sering	0	0
		Tidak Sering	83	100,00%
15	Tingkat Keamanan	aman	65	78,30%
		cukup aman	18	21,70%
		Tidak Aman	0	0
16	Kebutuhan Rumah Tangga	Sudah Terpenuhi	71	85,50%
		Kurang Terpenuhi	12	14,50%
		Tidak Terpenuhi	0	0
17	Bantuan Bahan Pangan	Pernah	28	33,73%
		Jarang	15	18,07%
		tidak Pernah	40	48,20%
18	Penggunaan Lahan Sebelum ada transmigrasi	Pertanian	33	39,80%
		Perkebunan	0	0
		Perdagangan dan Jasa	0	0
		lain-lain	50	60,20%
19	Penggunaan Lahan setelah ada transmigrasi	Pertanian	17	20,50%
		Perkebunan	66	79,50%
		Perdagangan dan Jasa	0	0
		lain-lain	0	0
20	Jenis Produksi	Padi Sawah	0	0
		sawit	83	100,00%
		Karet	0	0
		Sayuran	0	0
		Lain-lain	0	0
21	Tingkat Kepadatan Penduduk	Padat	0	0
		sedang	61	73,50%

No.	Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah	Indikator	Jumlah	Percent
		jarang-jarang	22	26,50%
22	Pemerataan Penduduk	Sudah baik	44	53,00%
		Belum beraturan	39	47,00%
23	Jumlah Pengangguran	Banyak	0	0
		tidak banyak	83	100,00%
		Tidak Ada	0	0
24	Tingkat Pengangguran	Menurun	83	100,00%
		Meningkat	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 5.29, diketahui bahwa seluruh indikator yang memberikan pengaruh dari adanya transmigrasi terhadap perkembangan wilayah yaitu terhadap tingkat pendapatan, yang mana setelah adanya transmigrasi tingkat pendapatan masyarakat diatas Rp 2.937.000/bulan, lalu budaya lokal dari transmigrasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat, sehingga berkembangnya kebudayaan mereka di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Tidak hanya budaya lokal, rasa kekeluargaan juga terjalin erat dengan sering dilakukannya gotong royong untuk pembangunan desa dan keamanan desa, sehingga desa menjadi aman dari tingginya tingkat kejahatan dan menjadi desa yang aman.

Penggunaan lahan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sebelumnya merupakan hutan dan pertanian, setelah adanya program transmigrasi sehingga penggunaan lahan berubah menjadi perkebunan. Pengaruh transmigrasi yang memberikan perkembangan dalam wilayah yaitu tingginya produksi perkebunan yaitu sawit sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat, baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal, dari hasil perkebunan sawitlah mereka

dapat menghidupi keluarga dan membangun desa bersama sehingga menjadi desa yang maju. Karena besarnya hasil dari perkebunan sawit tersebut, dan sumber daya manusia yang tersedia juga dimanfaatkan untuk bekerja di kebun sawit, sehingga berkurangnya pengangguran di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dan rendahnya tingkat pengangguran di desa tersebut. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru memiliki kepadatan penduduk yang sedang karena adanya program transmigrasi, yang mana fungsinya untuk mengurangi kepadatan penduduk.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian terkait Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tenggara Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ialah :

1. Terdapat perubahan kondisi sosial-ekonomi para masyarakat migran ketika berada di Kepenghuluan Labuhan Tenggara Baru, dalam hal ini pekerjaan dan tingkat pendapatan para migran jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi sosialekonomi masyarakat migran di daerah asalnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa program transmigrasi berpengaruh yang baik terhadap masyarakat transmigran.
2. Kehidupan ekonomi mereka meningkat dan terus berpengaruh terhadap jangkauan pendidikan. Jika dahulu mereka datang dengan latar pendidikan sekolah dasar dan bahkan tidak tamat, maka sekarang ini kebanyakan dari anak cucu mereka telah menikmati perkembangan pendidikan yang ada. Satu demi satu keturunan mereka menamatkan sekolah bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi. Terlepas dari itu peran transmigrasi bagi pengembangan wilayah khususnya di wilayah transmigrasi Kepenghuluan Labuhan Tenggara Baru telah menuai berbagai perubahan seperti perubahan pada sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Serta transmigrasi juga memiliki peran yang penting dalam memperbaiki perekonomian di Kepenghuluan Labuhan Tenggara Baru . Namun masih ada yang harus dibenahi dan di tingkatkan lagi keefektifan nya. Dan program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tenggara

Baru sudah dikatakan berhasil karena telah membantu dan mendorong dalam pengembangan perekonomian di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah

Kepada pihak Pemerintah, untuk memperbaiki fasilitas yang kurang memadai seperti mengadakan pemasukan sumber air bersih seperti PDAM ke Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru , seperti akses jalan masih ada jalan yang harus dibenahi, dan mendukung produk unggulan yang ada sehingga dapat di kembangkan ke luar daerah Kecamatan ataupun Kota sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat khususnya masyarakat transmigrasi, agar terus mengembangkan mutu, kualitas sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan dan program unggulan, sehingga nantinya ada produk atau sesuatu yang dapat menjadi khas dari kawasa tersebut,.

3. Akademis

Bagi para akademisi atau peneliti selanjutnya terhadap Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru sangat perlu dilanjutkan dalam upaya perbaikan kesejahteraan, pemerataan dan peningkatan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat. Sehingga nantinya bisa digunakan sebagai acuan dan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Akhmad Fauzi, Sofyan. (2013). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Artikel, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Astuti, Puji (2014). Studi Pola Pergerakan Mengkonsumsi Fasilitas Sosial di Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Eddy, Flo. (2015). Syarat Transmigrasi Terkini dalam Analisa Transmigrasi Masa Kini. Artikel, Merahputih.com. Tangerang Selatan
- Rustiadi, Ernan dan Junaidi. (2011). Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. Makalah Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Jakarta.
- Fahrudin, Adi, (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama : Bandung.
- Friedman, John and Allonso, W. (2008) Regional Economic Development and Planning. Regional Economic Centre, Nagoya, Japan
- Giyarsih, Rum Sri, (2008). Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Samendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Transmigrasi Terhadap Kesejahteraan Warga Transmigran. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmad, (2006) . Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Moleng, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nova, Yosi, (2016) Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat : Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016 : 23-36.

Setyorini Indah, dkk. (2018). Peran Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya. Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Kota FT UNTAN.

Standing, G. (2001). Konsep – Konsep Mobilisasi di Negara Sedang Berkembang: Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Yusup, (2013). Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigrasi di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Ulu.

I Made Wirartha, (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sumber Dokumen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, (2017). Gambaran Kabupaten Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka.

BKKBN, (2014). Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, Sumatra Utara : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, (2019). Pengertian, Tujuan, Jenis dan Dampak Transmigrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Tahun (2018 – 2023)

Undang-Undang No 5 Tahun 1969 menetapkan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Kepenghuluan
Labuhan Tangga Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun
(2020 – 2021)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau